SISTEM POLITIK ITU PENTING ATAU KEPENTINGAN SISTEM POLITIK?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

SISTEM POLITIK ITU PENTING ATAU KEPENTINGAN SISTEM POLITIK?

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

Sistem Politik Itu Penting Atau Kepentingan Sistem Politik?

H. Cecep Suryana
Fahminah Shaleha
Fajri Ramadhan
Amalia Ristanti
Ikhsan Insanul Hakim
Indry Febrian
Isna Fitriani
Kamil Ihza
Maulida Muthmainnah
Roby Zamzam Rafsanjani

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Sistem Politik Itu Penting Atau Kepentingan Sistem Politik?

Penulis:
H. Cecep Suryana
Fahminah Shaleha
Fajri Ramadhan
Amalia Ristanti
Ikhsan Insanul Hakim
Indry Febrian
Isna Fitriani
Kamil Ihza
Maulida Muthmainnah
Roby Zamzam Rafsanjani

ISBN: 978-623-88160-6-4 (PDF)

Editor:
Asep Iwan Setiawan

Penyunting:
Khoiruddin Muchtar

Desain Sampul dan Tata Letak:
Ridwan Rustandi
Rahmat Ridwan

Penerbit:
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Redaksi:
Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jl. AH. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Bandung
Telepon : 022-7810788
Fax : 0227810788
E-mail :fdk@uinsgd.ac.id
Website : https://fdk.uinsgd.ac.id/

Cetakan pertama, Juli 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku. Penulisan buku ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan tugas Ujian Akhir Semester (UAS) Mata kuliah Sispolindo. buku ini sendiri berjudul "Sistem Politik Itu Penting Atau Kepentingan Sistem Politik"**.**

Dalam penulisan buku ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan buku ini.

Di dalam buku ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan demi penyempurnaan pembuatan buku ini. Akhir kata semoga buku ini bisa bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Bandung, 30 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Manusia, Masyarakat, Negara 1

B. KELOMPOK KEPENTINGAN 11

BAB II ISI **17**

A. Sejarah Perkembangan Dan Pertumbuhan Kelompok Kepentingan Di Indonesia 17

B. Tujuan dan Cara mempengaruhi pemerintahan 32

C. Kedudukan dan simtem politik 35

D. Dinamika Kelompok 49

E. Konflik dalam Kelompok dan Respon terhadap Konflik 50

F. Pengaruh Kelompok Kepentingan Dalam Menentukan Keputusan 59

G. Model Politik Kepentingan Kelompok 65

H. Strategi Politik Kelompok kepentingan 66

I. Peran dan Fungsi Kelompok Kepentingan 67

J. Partai Politik 69

A. Simpulan 70

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA **71**

BIOGRAFI PENULIS **73**

BAB I PENDAHULUAN

A. Manusia, Masyarakat, Negara

Manusia sebagai makhluk yang berpolitik,makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang berbudaya, makhluk yang berbahasa dan makhluk yang berbicara (Nata,2009 :29). Menurut Adz-Dzaky (2004:13) manusia adalah salah satu makhluk ciptaan allah yang paling sempurna baik dari aspek jasmaniyah dan lebih-lebih rohaniyyah.

Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif.

Manusia adalah makhluk yang terbukti berteknologi tinggi. Ini karena manusia memiliki perbandingan massa otak dengan massa tubuh terbesar diantara semua makhluk yang ada di bumi. Walaupun ini bukanlah pengukuran yang mutlak, namun perbandingan massa otak dengan tubuh manusia memang memberi kan petunjuk dari segi intelektua lrelatif.

Manusia juga sebagai mahkluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya.

Manusia Dalam Perspektif Agama Islam

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan. Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Islam menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan

manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudgah sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah SWT yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Allah menciptakan manusia yaitu menjadi sebaik-baik ciptaannya.

Dalam pandangan Islam, manusia didefinisikan sebagai makhluk, mukalaf, mukaram, mukhaiyar, dan mujizat. Manusia adalah makhluk yang mempunyai nilai-nilai fitri dan sifat- sifat insaniah, seperti dha‟if lemah‟ (an-Nisaa‟: 28), jahula bodoh‟ (al-Ahzab: 72), faqir „ketergantungan atau memerlukan‟ (Faathir: 15), kafuuro „sangat mengingkari nikmat‟ (al-Israa‟: 67), syukur (al-Insaan:3), serta fujur dan taqwa (asy-Syams: 8). Selain itu juga tugas Manusia diciptakan yaitu untuk mengimplementasikan tugas-tugas ilahiaah yang mengandung banyak kemaslahatan dalam kehidupannya. Manusia membawa amanah dari Allah yang mesti diimplementasikan pada kehidupan nyata. Keberadaan manusia didunia

memiliki tugas yang mulia, yaitu sebagai khilafah.(Imam Syafe,i, 2009) Keberadaannya tidaklah untuk sia-sia dan tanpa „tujuan".

Manusia adalah makhluk ciptaan allah yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya, dengan segala keistimewaan yang ada pada diri manusia mempunyai akal yaitu bisa membedakan yang baik dan yang buruk.

1. Manusia Menurut Para Ahli

a. NICOLAUS D. & A. SUDIARJA : Manusia adalah bhineka,tetapi tunggal. Bhineka karena ia adalah jasmani dan rohani akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu barang.
b. ABINENO J.I : Manusia adalah "tubuh yang berjiwa" dan bukan "jiwa abadi yang berada atau yang terbungkus dalam tubuh yang fana"
c. UPANISADS : Manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh (atman), jiwa, pikiran, dan prana atau badan
d. OMAR MOHAMMADAL-TOUMY AL-SYAIBANY : Manusia adalah mahluk yang paling mulia, manusia adalah mahluk yang berfikir, dan manusia adalah mahluk yang memiliki 3 dimensi (badan, akal, dan ruh), manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungan.
e. SOKRATES : Manusia adalah mahluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku datar dan lebar.
f. KEES BERTENS : Manusia adalah suatu mahluk yang terdiri dari 2 unsur yang kesatuannya tidak dinyatakan.
g. I WAYAN WATRA : Manusia adalah mahluk yang dinamis dengan trias dinamikanya, yaitu cipta, rasa dan karsa.
h. ERBE SENTANU : Manusia adalah mahluk sebaik-baiknya ciptaan-Nya. Bahkan bisa dibilang manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan mahluk yang lain.
i. PAULA J. C & JANET W. K : manusia adalah mahluk terbuka, bebas memilih makna dalam situasi, mengemban tanggung jawab atas keputusan yang hidup secara kontinu serta turut menyusun pola berhubungan dan unggul multidimensi dengan berbagai kemungkinan.

2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat mengandung pengertian suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang sangat luas sifatnya. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh rasa identitas bersama.

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu

sama lain. Saling mempengaruhi artinya pengaruh dan pertalian kebathinan yang terjadi dengan sendirinya yang menjadi unsur yang harus ada bagi masyarakat. Masyarakat bukan berarti penjumlahan orang-orang saja, tetapi diantara mereka harus ada pertalian satu sama lainnya yang merupakan kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses dan menyebabkan perubahan dapat terjadi dalam kehidupan manusia.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama, menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama. Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan pengolahan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia.. Kemudian masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan berkerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang dirumuskan. Dapat di simpulkan masyarakat itu adalah suatu system, kesatuan manusia yang memiliki suatu interaksi, kebiasaan (adat-istiadat), tata cara hidup bersama yang hidup dengan batasan-batasan (aturan-aturan) dan mengangagap diri mereka suatu kesatuan sosial yang bersifat kontinyu dan terikat.

3. Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli

a. Paul B. Harton

   Menurut Paul B. Harton, pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu relatif cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok manusia tersebut.

b. Ralp Linton

   Menurut Ralp Linton, pengertian masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebaga suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas.

c. John J. Macionis

   Menurut John J. Macionis, definisi masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama.

d. Menurut Soerjono Soekanto,

   pengertian masyarakat adalah proses terjadinya interaksi sosial, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu interaksi sosial dan komunikasi.

e. Selo Sumardjan

Menurut Selo Sumardjan, pengertian masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan.

f. An-Nabhani

Pengertian masyarakat merupakan sekelompok individu yang mempunyai pemikiran perasaan, dan aturan yang sama, serta dapat terjadi interaksi antar sesama karena adanya kesamaan untuk kebaikan masyarakat dan warga masyarakat itu sendiri.

g. Menurut Karl Marx

Masyarakat sebagai struktur atau tatanan yang menderita ketegangan organisasi maupun perkembangan disebabkan adanya pertentangan antara berbagai kelompok yang terpecah secara ekonomis.

h. Menurut Thomas Hobber

Masyarakat dapat disebut sebagai komunitas yaitu proses alamiah dimana sekelompok orang hidup bersama guna memaksimalkan kepentingan mereka, dan kepentingan diri tiap individu dapat diperolah dalam sebuah kelompok tersebut.

i. Menurut Emile Durkheim

Masyarakat ialah suatu kenyataan objektif untuk tiap-tiap individu dimana ia adalah anggotanya.

j. Menurut Mack Ever

Masyarakat dapat disebut sebagai sistem atau aturan dari prosedur, otoritas, serta bertujuan untuk saling bantu-membantu yang diantaranya meliputi kelompok dan pembagian sosial, sistem pengawasan dari tingkah laku tiap individu dan kebebasan. Aturan yang kompleks serta selalu berubah dari relasi sosial.

k. Soerjono Soekanto : Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat pada umumnya memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut…

   a) Manusia yang hidup bersama; sekurang-kurangny terdiri atas dua orang
   b) Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia.
   c) Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
   d) Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain.

l. Marrion Levy : Menurut Marion Levy, Empat kriteria yang perlu dipenuhi agar suatu kelompok dapat disebut masyarakat, adalah sebagai berikut..

a) kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggotanya
b) perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran
c) adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada
d) kesetiaan terhadap suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama

4. Ciri-Ciri Masyarakat

a. Manusia yang Hdup Berkelompok

Manusia yang hidup secara bersama-sama dan kemudian membentuk sebuah kelompok. Dari kelompok yang dibentuk tersebut kemudian menjadi masyarakat. Mereka mengenali satu sama lain tiap anggota masyarakat dan saling ketergantungan. Kesatuan sosial adalah perwujudan yang terjadi dalam hubungan sesama manusia. Seorang manusia tidak dapat melanjutkan hidupnya tanpa bergantung dengan orang lain.

b. Melahirkan **Kebudayaan**

Dalam konsepnya, tidak ada suatu masyarakat yang tidak mempunyai budaya. Masyarakat yang melahirkan kebudayaan dan budaya tersebut kemudian diwarisikan dari generasi ke generasi dengan adanya proses-proses penyesuaian.

c. Mengalami Perubahan

Seperti yang terjadi dalam budaya, suatu masyarakat juga akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Contohnya : terdapat penemuan baru yang mungkin saja dapat mengakibatkan perubahan kepada suatu masyarakat itu sendiri.

d. Manusia yang Berinteraksi

Interaksi yang terjadi dapat secara lisan ataupun tidak serta suatu komunikasi berlaku apabila terdapat masyarakat bertemu dengan satu sama lain.

e. Terdapat Kepimpinan

Pemimpin dapat terdiri dari ketua keluarga, ketua negara, dan sebagainya. Dalam masyarakat Melayu pada awal kepimpinannya bercorak tertutup, karena pemilihan yang berdasarkan keturunan.

f. Terdapat Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial merupakan meletakkan salah satu orang pada sebuah kedudukan dan peranan yang harus dilakukan dalam suatu masyarakat.

5. Fungsi Masyarakat

a. Social Alignment

Social Aligment merupakan suatu sistem dengan pengelompokkan yang berdasarkan kekerabatan, jenis kelamin, umur, berbagai bentuk dari perkumpulan yang berdasarkan pekerjaan sama, kedudukan ataupun status peranan.

b. Social Controls

Social Controls merupakan suatu sistem serta proses yang bertujuan guna mengatur kegiatan dan juga tingkah laku dari tiap individu masyarakat. Sistem ini dapat disebut sebagai sistem pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengendalikan tiap anggota masyarakat untuk mengatur kehidupannya.

c. Social Media

Social Media merupakan suatu perlengkapan dan peralatan, yang dapat berupa benda ataupun sebuah bahasa yang kemudian dijadikan sebagai media bagi para anggota masyarakat untuk melangsungkan interaksi dan komunikasi dengan sesamanya.

d. Social Standards

Social Standards adalah suatu ukuran sosial yang dipakai guna menilai dan menentukan seluruh kegiatan dan menilai efektif atau tidaknya suatu kegiatan.

6. Unsur-Unsur Masyarakat

a. Terdapat perkumpulan manusia dan jumlah anggotanya banyak.
b. Terdapat aturan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat guna menuju pada tujuan dan kepentingan bersama.
c. Telah hidup dan bertempat tinggal dalam waktu yang lama pada daerah tertentu.
d. Bila dipandang dari cara terbentuknya sebuah masyarakat, antara lain:
e. Masyarakat natur, adalah masyarakat yang dapat terjadi dengan sendirinya baik itu disengaja ataupun tidak. Seperti : suku, geromboklan (harde), dan lain sebagainya.
f. Masyarakat kultur, adalah masyarakat yang dapat terjadi dikarenakan adanya kapentingan kepercayaan atau keduniaan.

7. Pengertian Negara

Negara merupakaan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupanmasyarakat. Pada prinsipnya setiaap warga mayaraka menjadi anggota dari suatu negara danharus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yangada di dalamnya, masarakat ingin

mewujutkan tujuan tujuan tertentu sepertti teerwujudnyakertentaraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyrakat.

Secara literal istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni state (bahasa inggris), staat (bahasa belanda dan jerman) dan etat (bahasa prancis) kata state,staat,etat di ambil dari bahasa latin status atau statum yang berarti tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap Secara terminologi negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat.

Secara etimologis istilah "negara" merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yaitu state (bahasa Inggris), staat (bahasa Jerman dan Belanda), dan etat (bahasa Prancis). Kata state, staat, dan etat itu diambil oleh orang-orang Eropa dari bahasa Latin pada abad ke-15, yaitu dari kata statum atau status yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang bersifat tetap dan tegak.

Di Indonesia sendiri, istilah "Negara" berasal dari bahasa Sansekerta nagara atau nagari, yang berarti kota. Sekitar abad ke-5, istilah nagara sudah dikenal dan dipakai di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh adanya penamaan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selain itu, istilah nagara juga dipakai sebagai penamaan kitab Majapahit Negara Kertagama yang ditulis Mpu Prapanca. Jadi, istilah "negara" sudah dipakai terlebih dahulu di Indonesia jauh sebelum bangsa Eropa.

Negara adalah suatu kumpulan orang yang telah mempunyai kehendak/tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama-sama. Kelompok masyarakat tersebut memiliki rasa senasib dan sepenanggungan untuk menjalankan hidup bersama-sama di dalam suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya. membentuk organisasi masyarakat dan memiliki pemerintahan yang sah untuk mengatur warga atau masyarakatnya.

8. Pengertian Negara Menurut Para Ahli

a. Menurut Prof. Mr. Kranenburg
   Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia/orang yang disebut bangsa.
b. Menurut R.M. Maclver
   Negara adalah asosiasi yang menyelenggarkaan ketertiban di dalam suatu masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.
c. Menurut Hugo de Groot (Grotius)

Negara merupakan ikatan manusia yang inshaf akan arti dan panggilan hukum kodrat.

d. Menurut Harold J. Laski
   Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada kelompok atau individu yang merupakan bagian dari masyarakat.
e. Menurut Benedictus de Spinoza
   Negara adalah susunan masyarakat yang kesatuan (integral) antara semua golongan dan bagian dari seluruh anggota masyarakat (persatuan masyarkat organis).
f. Menurut Prof. R. Djokosoetono
   Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di suatu pemerintahan yang sama.
g. Menurut Georg Wilhelm Friedrich Hegel
   Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis antara kemerdekaan individu dengan kemerdekaan universal.
h. Menurut Bellefroid
   Negara adalah suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertingi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.
i. Menurut Prof. Miriam Budiarjo
   Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu
j. Menurut M. Solly Lubis. SH
   Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia yang merupakan suatu komunitas dengan syarat-syarat tertentu, seperti memiliki wilayah, rakyat dan pemerintahan.

9. Bentuk-Bentuk Negara

a. Bentuk Negara Pada Zaman Yunani Kuno
   Pada masa yunani kuno dahulu hanya dikenal adanya 3 bentuk pokok dari negara. Pada waktu itu pengertian dari negara, pemerintahan dan masyarakat masih belum dibedakan, hal ini disebabkan karena susunan negara masih sangat sederhana sekali, bila dibandingkan dengan luas daerah negara dan julah penduduknya belu sebesar asa sekarang ini.
   Adapun tiga bentuk pokok daripada negara pada masa yunani kuno tersebut ialah: Monarchi, Oligarchi, dan Demokrasi. Dipergunakan sebagai ukuran

untuk membedakan bentuk-bentuk tersebut diatas yaitu: jumlah dari pemegang kekuasaan.

b. Bentuk Negara pada Masa Modern Sekarang.

Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah: negara kesatuan(Unitarianisme) dan negara serikat (Federasi)

1) Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi kedalam 2 macam sistem pemerintahan yaitu: Sentral dan Otonomi.

a) Negara kesatuan dengan sisitem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini.

b) b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk memgurus urusan pemerintahan diwilayah sendiri. Sisitem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan paske Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukan kedalam model ini

2) - Negara Serikat

Negara serikat atau Federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat.

Bentuk Negara dapat digolongkan ketiga kelompok yaitu: Monarki, Oligarki, dan Demokrasi.

c. Monarki

Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki ada dua jenis yaitu: Monarki absolut dan monarki konstutional.

d. Oligarki

Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu

e. Demokrasi

Pemerintahan model demikrasi adalah pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau bendasarkan kekuasaannya pada

pilihan atau kehendak rrakyat malalui mekanisme pemulihan Umum (pemilu) yang berlangsung secara jujur, bebas, aan, dan adil.

B. KELOMPOK KEPENTINGAN

Efektifitas sesuatu sistem politik pada faktanya bisa dilihat sepanjang mana kesanggupannya dalam menjawab tuntutan- tuntutan ataupun sokongan yang diterimanya dan memendekkannya dalam wujud kebijaksanaan ataupunoutput yang pas. Hasil dari tiap kebijaksanaan ialah bagian dari cara politik yang memantulkan beragamnya harapan yang timbul yang ialah konsekwensi dari beragamnya kebutuhan warga. Walaupun begitu, dalam sistem politik, tidak seluruh harapan yang timbul bisa disalurkan lewat kekuatan-kekuatan politik resmi semacam partai politik yang mempunyai guna sah selaku agen harapan, namun pula daya lain ialah golongan kebutuhan(interest group). Dalam langkah khusus, keterbatasan partai politik, bagus sebab sumberdaya material, sumberdaya orang, arah pandangan hidup, kebudayaan, faksionalisme, kebutuhan waktu pendek, atensi kepada rumor, keterbatasan jaringan, permasalahan komunikasi, ikatan personil, serta lain- lainmenyebabkan mereka sering- kali tidak lumayan bisa diharapkan buat mengantarkan harapan dalam warga dengan cara efisien.

Keadaaan ini menimbulkan orang lebih menumpukan perhatiannya dalam mengantarkan harapan lewat faktor golongan. Dengan begitu, golongan kebutuhan ialah salah satu daya berarti dalam bentuk politik yang dalam langkah khusus bisa mendinamisasikan sistem politik, dalam wujud lahirnya politik kelompokkelompok yang menerangkan terdapatnya pluralisme serta pertandingan dalam warga. Bertitik dorong dari uraian itu, postingan ini hendak membicarakan mengenai kewujudan golongan kebutuhan, dan akibat serta perannya dalam sistem politik. Sepanjang ini diskusi- diskusi mengenai cara politik lebih banyak disandarkan pada partai politik. Sementara itu dalam kenyataanya bersamaan dengan membiaknya kehidupan warga serta timbulnya sektor- sektor terkini dalam kehidupan menimbulkan kehadiran golongan kebutuhan butuh diperhitungkan dengan cara politik.

Golongan kebutuhan(interestgroup) kerapkali di defenisikan selaku, agroup of persons World Health Organization share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests(Benditt 1975: 34). Bersumber pada arti itu guna golongan kebutuhan terbatas pada akumulasi serta pelafalan kebutuhan saja. Mereka ialah golongan sistematis yang mempunyai tujuan bersama yang dengan cara aktif berupaya pengaruhi rezim(Janda, Berry,& Goldman 1997). Dengan tutur lain, tujuan mereka cumalah berupaya buat“ pengaruhi” cara pengumpulan kebijaksanaan penguasa supaya

cocok dengan kemauan golongan yang diwakilinya. Sebab itu, bila dibanding dengan guna partai politik hingga kira- kira berlainan serta lebih kecil. Sepertimana didefinisikan oleh Giovanni Sartori, partai politik selaku, any political group that presents at elections, and is capable of placing through elections, candidates for public offices(1984: 64). Berdasarka arti itu, partai politiksesungguhnya dengan cara terencana bertujuanuntuk menyuruh wakil-wakilnya dalam rezim, ataupun mencapai jabatan- jabatan dalam rezim.

1. Pengertian dan jenis kelompok kepentingan

Dalam prakteknya terdapat berbagai macam jenis golongan kebutuhan yang bekerja dalam warga, yang mana mereka berupaya pengaruhi kebijaksanaan penguasa. Selaku pemeran nonpemerintah, mereka bisa berbentuk: Golongan professional, aliansi pegawai, orang dagang, wiraswasta, badan keimanan, aliansi orang dagang, organisasi- organisasi aliansi mahasiswa, lembaga- lembaga pandangan, asosiasicendekiawan ataupun ahli, federasi industri, universitas, badan berplatform etnik, wilayah, generasi(wangsa), serta lainlain. Daya mereka berawal dari status keahlian dan sumberdaya orang ataupun anggaran serta jaringan yang dipunyai. Kelompok- kelompok kebutuhan kerapkali jadi determinan skedul, penggalang issu, penyebar buah pikiran, perumus kebijaksanaan, dan penekan pada penguasa. Walaupun mereka bermaksud menggantikan kepentingan- kepentingananggotanya, dalam arti kepentinganpublik yang terbatas, namun adakalanya di antara anggota- anggota golongan kebutuhan pula mempunyai ambisi- ambisi yang bertabiat individu. Apalagi terdapat di antara lain yang dengan cara individu berhasilmasuk dalam rezim serta bukan atas julukan golongan kepentingannya.

Golongan kebutuhan pada hakikatnya bisa dipecah jadi 2, ialah: Awal, golongan kebutuhan eksklusif; serta kedua, golongan kepentinganpublik. Golongan kebutuhan priva golongan kebutuhan yang berupaya mengupayakan kepentingankepentingan anggota- anggota yangdiwakilinya(kalangan khusus) dalam kondisi kehidupan biasa semacam: Pengacara, dokter, akuntan, dosen, guru, juri, pengacara, dan kalangan professional lain, tercantum pula para pekerja ataupun pegawai. Pula dalam kondisi iniadalah kebutuhan produsen atas bidangbidang upaya khusus. Sedangkan golongan kebutuhan yang bertabiat khalayak merupakan golongan kebutuhan yang lebih mengarah pengaruhi penguasa supaya melaksanakan aksi khusus yang profitabel kebutuhan biasa dengan cara global, dibanding anggotanya. Ilustrasi dari tipe golongan kebutuhan ini merupakan geraka- gerakan sosial yang mengadvokasi isu- isu area, pembelajaran, pertambangan, wanita, penggelapan, kekerasan, perdagangan orang, pelanggan serta serupanya.

Almond serta Powell(1980) dalam buatan klasiknya memilah golongan kebutuhan jadi 4 tipe, ialah: Awal, golongan anomik, yang ialah golongan kebutuhan yang bertabiat otomatis, terbatas, timbul mendadak. Golongan kebutuhan ini mempunyai tingkatan keahlian komunikasi politik yang kecil, dengan jalinan keahlian yang longgar, serta cuma dalam bagan buat menjawab kejadian khusus. Golongan ini lebih ialah inovasi ke dalam sistem politik berkaitan dengan isu- isu khusus yang bisa jadi merespon kepada tindakan kegagalan khusus, alhasil melahirkan serta kekacauan. Tetapi begitu, sehabis harapan mereka didengar oleh penguasa hingga golongan ini hendak bubar. Mereka semacam: Jalinan Masyarakat Desa Pulo yang tergusur; Masyarakat penunggu Kalijodo; Aliansi orang dagang rotan di Rawasari, serta sejenisnya. Kedua, golongan nonassosiasional, yang ialah golongan kebutuhan yang diorganisasikan dengan cara informal, dengan keahlian yang longgar serta aktifitasnya tergantung pada isu- isu khusus. Jaringan golongan ini terbatas, namun lebih bagus dibanding golongan awal di atas.

Golongan nonassosiasional berlainan dengan golongan anomik dalam perihal keanggotaannya, yang umumnya bertabiat serupa kerangka balik ataupun identitasnya. Golongan ini melingkupi golongan generasi, etnik, regional, agama, status, kategori sosial. Ilustrasi golongan ini merupakan: Trah Keluarga Mangkunegaran; Jalinan Masyarakat Yogyakarta di Jakarta, Jalinan Masyarakat Dayak Se- Kalimantan, Jalinan Saudagar Bugis, Alumni ITB, Alumni Pembelajaran Lemhannas, Alumni Pondok Madrasah Gontor, kelompok- kelompok arisan keluarga, kantor, desa, serta lain- lain. Ketiga, golongan institusional yang ialah golongan kebutuhan yang melembaga dengan cara resmi, dengan aktivitas teratur, dan jaringan badan yang kokoh serta keahlian yang bertabiat sah. Golongan ini mempunyai guna sosial serta politik yang besar, melingkupi nyaris beberapa besar bidang kehidupan(ekonomi, sosial, pembelajaran, adat, seni, hukum, keluarga, area, serta lain- lain), di sisi tujuan- tujuan spesial yang mereka punya.

Ilustrasinya yakni: Badan Nahdlatul Malim(NU); Muhammadiyah; Aliansi Islam(Benar); Jalinan Kaum cerdik cendekia Mukmin Se- Indonesia, serta lain- lain. Keempat, golongan assosiasional, ialah golongan yang mempunyai badan yang bertabiat resmi, serta terorganisir dengan cara bagus, dengan keahlian yang sah ataupun bertabiat resmi pula. Golongan assosiasional beranggotakan banyak orang yang berawal dari satu pekerjaan yang serupa, dengan tujuan khusus buat menggantikan kebutuhan anggotanya atas bidangbidang khusus yang jadi fokusnya. Ilustrasinya merupakan: Badan Jalinan Dokter Indonesia(IDI); Aliansi Insinyur Indonesia(PII); Kamar Bisnis serta

Pabrik (IDI), Aliansi Guru Republik Indonesia(PGRI); Jalinan Advokat Indonesia(IAI), Aliansi Reporter Indonesia(PWI) serta lain- lain. Dari keempat golongan kebutuhan di atas, yang sangat efisien dalam mengantarkan opini pada penguasa dan mungkin mendapatkan sokongan besar dari warga merupakan golongan institusional serta assosiasional. Sedangkan pada derajad yang kecil, yang sangat tidak efisien merupakan golongan anomik dan nonassosiasional.

2. Pertumbuhan dan Perkembangan kelompok kepentingan

Kalangan keinginan nyatanya telah lama mencuat dalam kehidupan politik moderen dalam berbagai bentuk kelakuan atau tubuh keinginan. Dalam politik di negaranegara maju sejenis di Inggris ditandai dengan tampaknya tubuh sejenis Masyarakat Pembatalan yang menentang perdagangan budak yang dibentuk di tahun 1780- an, yang sehabis itu diiringi organisasiorganisasi di pandangan lain. Di Amerika Perkongsian kelakuan itu ditandai dengan tampaknya berbagai aliansi dalam masyarakat yang berarti membela kepentingan- kebutuhan kalangan, bersebelahan dengan pihak Inggris atau kemajuan pemerintahan Amerika pada masa- era dini(Cigler and Loomis 2011: 8).

Kemajuan kerakyatan di Amerika Sindikat berkembang produktif serta bersumber kokoh, salah satunya sebab dibantu oleh timbulnya asosiasi- asosiasi warga itu. Situasi ini sepertimana dikemukakan oleh pemikir Perancis Era 19, Alexis de Tocqueville, kala mendatangi negeri itu dengan melaporkan kalau, asosiasi- asosiasi sudah jadi bagian inheren dalam adat politik Amerika Sindikat serta jadi sumbu untuk tegaknya kehidupan demokratis, yang tidak ditemui pada warga manapun kala itu(Tocqueville 1994: 167). Dalam banyak perihal kelahiran golongan kebutuhan nyaris mendekati dengan partai- partai politik. Cuma saja partai politik lebih diorientasikan pada usaha buat memenangkan suara pemilih serta menduduki jabatan- jabatan dalam kewenangan. Di Indonesia, sebagian golongan kebutuhan sudah lahir mendahulukan partai-partai politik. Mereka beranjak di aspek sosial, kemasyarakatan, ekonomi, kultur, pembelajaran. Beberapa di antara lain justru jadi cikal akan partai politik. Sebagian golongan kebutuhan yang dini di Indonesia timbul pada masa kolonial semacam: Sarikat Bisnis Islam(SDI), Al- Irsyad, Muhammadiyah, Serikat-Serikat Pegawai, pekerja sepur api, Halaman Anak didik, Badan Koperasi, Nahdlatul Malim serta lain- lain, jadi pelopor dini dalam timbulnya politik golongan.

Organisasiorganisasi itu beberapa beralih bentuk jadi besar serta sanggup pengaruhi kebijaksanaan penguasa. Pada era ke 20, paling utama sesudah Perang Bumi Kedua, di masa tahun 1950- an serta 1960- an di negara- negara

Barat golongan kebutuhan berkembang menjamur bersamaan dengan ekspansi kedudukan penguasa ke seluruh aspek kehidupan. Ekspansi birokrasi serta fungsi- fungsi rezim, bagus lokal ataupun nasional, dalam bagan penuhi desakan pembangunan sudah melahirkan asumsi dari kelompokkelompok dalam warga, yang merasa butuh ikut serta dalam isu- isu khusus. Perihal itu pula bersamaan dengan terus menjadi meratanya tingkatan pembelajaran serta pemahaman politik, dan melonjaknya keterampilan- keterampilan organisasional. Pertanda ini membuktikan kalau, terus menjadi banyaknya zona di mana penguasa jadi ikut serta, hingga terus menjadi banyak pula kepentingan- kepentingan spesial yang bertumbuh buat pengaruhi kebijaksanaan(Loomis 2011: 181- 182).

Tidak hanya itu, kedatangan golongan kebutuhan pula dipicu oleh mencuatnya isu- isu terkini yang jadi kesedihan biasa, bagus pada tingkatan lokal, nasional, ataupun garis besar. Apalagi belum lama banyak golongan kebutuhan yang mengupayakan isu- isu tunggal yang khusus. Perihal itu mulai dari permasalahan kekekerasan anak, perdagangan leluasa, kesetaraan wanita, area, perdagangan orang, hak asas orang, hutang luar negara, permasalahan tenaga, sumberdaya air, komunitas adat, hawa serta cuaca, hak pelanggan, proteksi fauna, pembelajaran kalangan kecil, ekonomi mikro, transgender, serta serupanya. Aksi ini, buat beberapa, ialah bagian dari aksi sosial terkini yang lalu mendapatkan tempat dalam warga moderen. Sedangkan pada sektor- sektor khusus, lahirnya golongan kebutuhan berbentuk peperangan kelompok-kelompok federasi pekerjaan, perdagangan, subsektor kehidupan pelanggan, kelompok- kelompok dalam birokrasi, kaukus dalam parlemen, federasi para politisi dalam legislatif ataupun administrator serta pula yudikatif yang mengupayakan kebutuhan golongan lewat usulan- usulan, petisi- petisi, serta loby- loby khusus yang di informasikan.

Belum lama sehabis pembaruan tahun 1998 di Indonesia, gelombang kelahiran kelompok- kelompok kebutuhan terkini merebak dengan cara nasional. Atmosfer politik yang demokratis yang diisyarati dengan dentuman kesertaan menyebabkan beberapa badan warga mengantarkan tuntutan-tuntutannya dengan memakai saluran- saluran terkini di luar partai- partai politik, dalam wujud kelompok- kelompok kebutuhan(Horowitz 2014). Sepanjang kurang lebih 17 tahun terakhir ini diperkirakan tidak kurang 2500 an golongan kebutuhan lahir di semua tanah air, yang merangkumi bermacam pandangan kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial, adat, hukum, pembelajaran, keimanan adat, etnik, pers, serta lain- lain, dari tingkatan lokal hingga nasional. Agunan independensi yang besar dan terdapatnya pertandingan kokoh diantara kelompokkelompok seragam menaikkan terus menjadi serunya

kompetisi kebutuhan. Peran kelompok- kelompok ini ikut pengaruhi bentuk politik dan turut mendinamisasikan cara pengumpulan ketetapan penguasa. Walaupun begitu, cuma beberapa saja di antara kelompok- kelompok kebutuhan itu yang sanggup memberi warna ataupun pengaruhi kebijakan- kebijakan khalayak, spesialnya di tingkatan nasional. Sedangkan beberapa kecil golongan kebutuhan yang lain dibangun lebih ialah asumsi kepada isuisu sedetik yang timbul, atau terdapat sebab kebutuhan partai politik. Kelompokkelompok ini apalagi buat sebagiannya malah justru timbul selaku golongan penekan. Dalam hubungan ini, pengarang tidak memasukkan kelompok- kelompok semacam: Organisasi- organisasi teroris, Badan Papua Merdeka, Aksi Aceh Merdeka serta sejenisnya, sebab organisasiorganisasi itu tujuannya bukan pengaruhi kebijaksanaan penguasa namun buat menjatuhkan penguasa dengan cara inkonstitusional. Dengan tutur lain, mereka berupaya merestrukturisasi sistem politik serta bukan semata- mata mempengaruhinya.

BAB II ISI

A. Sejarah Perkembangan Dan Pertumbuhan Kelompok Kepentingan Di Indonesia

Kelompok kepentingan sesunggunya telah lama muncul dalam kehidupan politik modern dalam berbagai bentuk gerakan maupun organisasi kepentingan.

Dalam politik di negara-negara maju seperti di inggris ditandai dengan munculnya organisasi seperti masyarakat abolisi yang menentang perdagangan budak yang dibentuk di tahun 1780-an. Yang kemudian diikuti organisasi-organisasi di bidang lain.

Kedudukan kelompok kepentingan dalam system politik adalah terletak di antara pemerintah dengan masyarakat. Posisinya berada di tengah sebagai jembatan yang menghubungkan antara kepentingankepentingan masyarakat dan pemerintah.

Kelompok kepentingan terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan. Dengan kata lain tujuan mereka hanyalah untuk "mempengaruhi" proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya.

Jenis-jenis kelompok kepentingan yaitu,

1. Kelompok Anomic kelompok ini merupakan kelompok yang terbentuk diantara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika. Sebagai contohnya, persatuan pedagang yang akan digusur bersatu saat ingin digusur dengan berdemo dan kemudian menghilang saat aspirasi mereka terpenuhi. Dalam kasusunya kelompok ini memiliki ciri tidak bertahan lama dan terbentuk dengan spontan karena ada suatau penyebab mereka untuk berkumpul dan ketika keinginannya sudah tercapai maka akan cepat pula bubar.
2. Kelompok non assosiasional
   Kelompok ini merupakan Kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam (belum maju) dan tidak terorganisir rapi dan kegiatannya bersifat temporer.
   Contohnya, kelompok persatuan warga sunda di Jakarta, atau kelompok persatuan warga batak di bandung.
3. Kelompok institusional
   Selanjutnya adalah Kelompok formal, yaitu kelompok yang memiliki struktur, visi, misi, tugas dan fungsi sebagai artikulasi kepentingan.

Contohnya, kelompok Polisi Republik Indonesia, atau Kelompok Tentara Nasional Indonesia. Kedua-duanya memiliki tugas, visi, misi tersendiri. Dan terbentuk karena tujuan tertentu dengan kegiatan yang formal.

4. Kelompok assosiasional

   Dan yang terakhir adalah kelompok assosiasional, kelompok ini merupakan kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasi kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau perusahaan poemilik modal.

   Contohnya seperti ikatan dokter Indonesia.

Kelompok kepentingan memiliki sifat umum yakni, independen yang artinya dilakukan secara bebas dan tanpa intervensi. Yang kedua netral, yang artinya menjalankan eksistensinya tidak bergantung, Yang ketiga kritis, artinya menjala nkan eksistensinya berdasarkan data dan fakta serta analisis yang mendalam dengan metode analisis yang sahih. Dan yang terakhir yang keempat yaitu mandiri, yang artinya menjalankan eksistensinya dengan konsep diri oleh dan untuk mastarakat itu sendiri dan masyarakat luas.

Dalam prakteknya, kelompok kepentingan memiliki tujuan umum, yaitu:

1. Untuk meilindungi kepentingan anggota kelompoknya dari adanya dominasi dan penyelewengan oleh pemerintha atau negara.
2. Untuk menjadi wadah bagi pemberdayaan masyarakat dalam kehidupannya.
3. Untuk menjadi wadah pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dan negara.
4. Untuk menjadi wadah kajian dan analisis bagi aspek-aspek pembangunan nasional dalam semua bidang kehidupan.

Dari satu sisi, kelompok kepentingan dalam system politik indonesia memiliki kedudukan yang strategis dalam masyarakat, yakni sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.

Perumbuhan dan perkembangan kelompok kepentingan di indonesia sebenarnya sudah mulai pada zera sebelum kemerdekaan. Bahkan kelompok kepentingan selalu ada dimana-mana baik tempat maupun waktu, mungkin ketika indonesia masih belum terbentuk dengan banyaknya kerajaan kelompok kepentingan ini sudah ada. Adapun beberapa tahapan pertumbuhan kelompok kepentingan di indonesia sebagai berikut:

1. **Masa sebelum penjajahan**

Sebelum penguasa Barat datang ke Indonesia, system pemerintahan yang dibentuk bersifat monarki. Penguasaan negara sepenuhnya ada ditangan pribumi, raja, pangeran, sultan bahkan silsilah kerluarganya itu sendiri. Gaya politik yang digunakan tentunya kerajaan sesuai dengan bentuk negaranya. Keterlibatan militer didalamnya pun sangat kuat, dimana pada masa itu masih dalam kondisi peperangan yang sangat hebat. Penyaluran suatu tuntutan dianggap rendah dan terpenuhi. Sedangkan analisis kestabilitasan pada saat itu ada waktunya stabil ketika tidak adanya peperangan, dan ada waktunya tidak stabil ketika peperangan berlangsung. Perkembangan suatu nilai yang hidup dan efektif sesuai dengan penguasaan saat itu. Dan aparat negara memiliki sifat loyal yang sangat tinggi kepada negara. a. Jaringan Perdagangan Sebelum Eropa Barat masuk dan menguasai wilayah Nusantara, maka pada saat itu belum ada negara Indonesia. Megahnya Nusantara meliputi pulau-pulau yang dikelilingi indahnya daratan yang pada mulanya dipegang oleh raja-raja, terkadang hidup beriringan dengan aman dan terdapat juga saat dimana mereka saling berselisih. Sejak awal mula sejarah di Asia, terdapat aliran perdagangan yang telah tumbuh di Nusantara. Dengan adanya estimasi perdagangan tersebut merupakan suatu asset kekuasaan yang paling penting bagi seorang raja untuk mendapatkan kekuasaan sebagai kekuatan besar dan sangat berpengaruh bagi mereka. Akan tetapi, semakin luasnya jaringan perdagangan tersebut dapat mengakibatkan banyaknya pengaruh negara asing yang berhasil masuk ke wilayah Nusantara yang pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya suatu penjajahan.

Sejarah Indonesia sebelum 500 Masehi agak terlambat, karena sedikit sumbersumber sejarah yang tertulis pada masa itu. Disebabkan separuh tulisan sejarah dibuat dari bahan yang tidak kokoh, yang pada akhirnya para sejarawan berfokus pada peninggalan pada batu-batu dan bekas candi terdahulu untuk menganalisis sejarah lama Nusantara. Hal ini berakibatkan pada struktur politik pada zaman lalu dalam menerima Informasi berupa bangunan candi sebagai budaya luhur yang diberikan kepada elit penguasa. Sejarah Nusantara perpusat pada pulau Jawa dan Sumatera, karena Nusantara bagian Timur seperti selat Malaka sedikit aktivitas dalam bidang ekonominya dan letaknya yang jauh dari jalur perdangan inti. Maka dari itu kerajaan dan kekaisaran pada bagian Timur tidak dapat dijadikan sebagai kekuatan politik. b. Kedatangan Islam di Indonesia Islam dianggap sangat berpengaruh bagi kalangan elit Majapahit pada saat itu. Diperkirakan Islam masuk ke Asia Tenggara bagian maritime dari awal masa Islam ketika terjadinya suatu aktivitas perdagangan orang muslim

datang di Nusantara, membangun permukimann di wilayah pesisir, menikah dengan wanita sekitar, hingga dihormati karena kekayaan dari hasil perdagangan. Pada saat itu mulailah kalangan elit local merasa tertarik dengan agama tersebut, karena melihat sebagian besar pedagang memiliki kekayaan tersendiri dan menganggap hal itu sangat berpengaruh dalam keuntungan dalam politik perdangan. Pembangunan kekaisaran Islam salah satu tahap logis berikutnya, yang mana diduga masyarakat dari rajaraja local mulai bertahap menganut agama Islam. Pada abad ke-13 terdapat prasasti pada sebuah batu nisan yang menandakan adanya kekaisaran Islam di Sumatera sebelah utara dinamai dengan Pasaei dan Samudra. Dari wilayah tersebut melebar luas kearah Timur melalui perdagangan.

Namun jauh kemungkinan jika beberapa raja Jawa dari Majapahit di wilayah Jawa Timur menganut Islam. c. Kedatangan agama Hindu-Hudha ke Indonesia Menurut Teori Waisya. Golongan bangsa pedagang berperan aktif menyebabkan penganut Hindu Buda di Indonesia. keterkaitan dalam perdagangan antar India dan Indoneisa berjalan sejak abad satu Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tionghoa menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya, yang awalnya pedagang India berjalan untuk melakukan dagang. Waktu itu, rute perdagangan dijalani lewat rute laut sehingga mereka menggunakan kapal pelayaran menuju lokasi tempat perdagangan berlangsung. Hal ini mengakibatkan mereka bergantung terhadap arah angin dan cuaca alam, jika cuaca alam dan arah mata angin tanpa bersahabat sehingga mereka diam lebih lama dan menunggu kondisi yang stabil. Sembari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India, para pedagang India pun menetap berbulan-bulan di Indonesia. Karena interaksi yang cukup lama antara pedagang India dengan penduduk pribumi secara tidak langsung mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme.

Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu Budha ke masyarakat pribumi melalui berbagai cara, salah satunya seperti adanya ikatan pernikahan terhadap pribumi serta dengan melalui pernikahan tersebut mereka memberitahu budaya India yang lekat dengan agama Hindu Budha. d. Kedatangan Bangsa Eropa di Indonesia Mulai tahun 1500-an Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Negara yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Dibandingkan dari bangs Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi

nafigasi, dan perlengkapan yang paling canggih dimasanya. Untuk meminimalisir terjadinya bentrokan antara kedua bangsa tersebut, maka dibangunlah sebuah perjanjian Tordesilas yang berisi pembagian arah pelayaran yang dimana Portugis memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah Timur, sedangkan Spanyol memiliki hak berlayar dan berdagang ke arah Barat. Portugis mulai ekspedisi ke arah Timur pada tahun 1487, kemudian mereka sampai ke Maluku tepatnya di Ternate pada tahun 1512. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. Sedangkan Spanyol memilai ekspedisinya ke arah Barat pada tahun 1492, kemudian mereka tiba di Filipina pada tahun 1521. Setelah itu mereka melanjutkan perjalannya ke Nusantara di Maluku tepatnya di Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh kerajaan Tidore. Mereka yang sedang berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol menjadi sekutu untuk mengalahkan Ternate.

2. MASA PENJAJAH

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam begitu limpah ruah dari Sabang sampai Marauke, yang didalamnya berisi hamparan luas pulau-pulau yang dikelilingi oleh indahnya lautan. Ini menjadi salah satu incaran para kolonialisme yang berbondong-bondong untuk datang dengan alasan mencari rempah-rempah. Pada tahun 1596 kolonial Belanda akhirnya tiba di pelabuhan Banten. Akan tetapi pasukan koloni tersebut pada saat itu diusir oleh masyarakat sekitar pelabuhan dengan alasan mereka memiliki tatakrama yang sombong, kasar bahkan arogan terhadap pribumi. Sehingga secara terpaksa mereka meninggalkan Banten tanpa membuahkan hasil. Tidak berhenti disitu, colonial Belanda tiba kedua kalinya di pelabuhan Banten pada tahun 1598 Mahesi dibawah pimpinan Jacob Van Neck dan Wijbrand Van Wairwijck demi melangsungkan misinya. Kedatangan kala itu mereka berhasil menjalankan misi nya yang dimana mereka mendapatkan rempah-rempah hasil bumi Nusantara dengan cara membeli sesuai dengan incarnya. Belanda mendirikan kongsi dagang atau perusahaan perdagangan yang bernama VOC (Vereening Oost Indische Compaganie). Atas kesepakatan wali negara Belanda VOC resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1902 di Amsterdam, Belanda. Yang mana VOC berjalan dari tahun 1602-1800 sebagai masa kekuasaan VOC di Indonesia. Pada saat itu lah monopoli perdagangan pada pihak colonial Belanda dimulai. Yang mana, mereka membentuk sentra ekonomi yang kokoh dan menjalankan sebuah taktik sehingga pribumi merasa ketergantungan terhadap mereka. Pada akhirnya pribumi merasa tidak sadar jika colonial

Belanda sedang menjalankan misi kekuasaannya. Dengan ketergantungannya pribumi terhadap perdagangan belanda ini kemudian secara terus menerus berkembang di daerah-daerah lain, sehingga menimbulkan ekspansi perdagangan Belanda dengan menghasilkan rempah-rempah yang sangat melimpah melalui strageti politik yang dilakukan antara penguasa satu dengan penguasa lainnya. Luasnya wilayah Nusantara ini mengakibatkan para Belanda membuat trik Politik Devide Et Ampera atau biasa disebut politik pecah belah. Yang mana mereka dapat dengan mudah menguasai Nusantara sehingga politik yang dirancang secara halus bisa disebarluaskan di wilayahwilayah yang mereka anggap memiliki peran penting dalam ekspansi perdagangan oleh pihak Kolonial dengan proses pemberontakan antara penguasa satu dengan penguasa lain. Sebelum didirikan VOC para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling berombalomba untuk mendapatkan hasil yang melimpah. Saat itu koloni Belanda bertarung dengan pihak Spanyol dan Portugis.

Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi atau orgainsasi perussahaan. Pemerintah belanda yakin dengan hal ini jadi senjata ampuh dari senjata militer dan ekonomi. VOC dikelola olah 17 pengurus pusat yang disebut sebagai Heeren Zeventien yang dikenal juga dengan nama Dewan 17. Heeren Zeventien ini selain mengella VOC juga menanamkan sahamnya.Adapun tujuan utama didirikan VOC diantaranya ; • Menghindari persaingan antar perdagangan belanda • Mengatasi persaingan dengan perdagangan dari Bangsa Eropa lainnya seperti Spanyol, Portugis, dan Inggirs • Menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah Pada awalnya pembentukan VOC ini hanya mengurusi masalah perdagangan diwilayah Indonesia. Akan tetapi dalam sebuah perluasan VOC bergerak layaknya suatu Negara. VOC dijadikan sebagai Wakil Pemerintahan Belanda di Indonesia. Kemenangan VOC pada perluasan penguasaan justru mengakibatkan Hereen Zeveentien keberatan dalam mengelola VOC. Sehingga Hereen Zeveentien mengangkat Pieeter Boht menjadi Gubernur VOC pemula yang bertugas untuk merapihkan kelembagaan VOC. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Gubernur VOC pertama tersebut, salah satunya membeli sebuah tanah di Jayakarta yang akan menjadi kota Batavia. Pada masa itu Batavia menjadi pusat kekuasaan VOC, yang mana Batavia terdiri menjadi dua bagian, pertama disebut sebagai benteng Batavia yang berisi rumah gubernur, gereja, kantor-kantor utama VOC, gedung arsip dan tempat tinggal tentara VOC. Kedua, ialah pemukiman yangsudah ada dua abad sebelumnya. Batavia dibangun oleh belanda sebagai tiruan kota-kota besar di Belanda, dengan kekuasaannya belanda membangun tembok pembatas yang ertujuan dengan

mencegah masuknya orang-orang pribumi ke wilayah Batavia. Setelah masa perkembanganya VOC telah banyak mengalahkan penguas pribumi, seperti pada tahun 1667 VOC berhasil memaksan seorang penguasa Makasar yaitu Sultan Hasaudin untuk menyerah dan menandatangani perjanjian Bongaya. Perjanjian tersebut berisikan tentang deklarasi kekalahan penduduk terhadap VOC dan pengesahana monopoli perdagangan di Pelabuhan Makassar. Adanya pembentukan VOC jelas sangat menguntungkan pihak colonial saja, akan tetapi jika dilihat dari sisi lain justru hal ini sangat merugikan pihak pribumi yang mana mereka melakukan prakteknya dengan tidak manusiawi. Selain mengalami perkembangan yang pesat sebelumnya, tiba waktunya dimana pada tahun 1799 VOC harus gulung tikar hingga dibubarkan. Salah satu penyebab dibukarkannya itu karena terdabap pejabat VOC melakukan korupsi dan melakukan perlawanan terhadap kekuasaan lain dianggap kalah.

Pada masa ini, ketika indonesia dijajah belanda maupun jepang, kelompok lkepentingan ini sudah ada. Mengingat masuknya belanda ke indonesia jalur perdagangan melalui VOC, sudah jelas bahwa VOC ini termasuk kelompok kepentingan yang mana lambat laun ingin menjajah ke indonesia. Dalam prakteknya yang cukup lama, kelompok kepentingan ini bias berbagai bentuk, dalam satu kelompok atau grup yang memiliki tujuan terselubung didalam kegiatannya tanpa pihak luar tahu, atau ada juga segelintir orang yang memiliki kepentingan sendiri di dalam suatu kelompok tanpa diketahui anggota lainnya. Atau ada juga yang prakteknya suatu kelompok yang dibuat oleh segilintir orang atau dibuat oleh kelompok lain sebagai tangan panjang dari tujuan si pembuatnya.

Dari keragaman ini, tentukita bias tahu bahwa kelompok kepentingan ini akan berkembang sangat cepat dan tumbuh di mana-mana, dalam bidang apa saja tidak terkhusus bidang politik saja. Melihat fenomena datangnya VOC ke indonesia, tentu masyarakat akan tidak tahu apa maksud dan tujuan yang sebenarnya. Melalui perdagangan ini tidak aka nada orang yang tahu kedepannya akan menjadi penjajah negara kita. Dari kelompok kecil, kemudian perlahan membesar, kemudian memiliki kekuatan di bidang tertentu saja, kemudian menjalar ke bidang lainnya, hingga akhirnya sangat kuat di berbagai bidang, sehingga kekuatan di segala aspek pun dikuasai.

Kelompok kepentingan pada era ini, tentu berperan terselubung dalam prakteknya, tidak serta merta terang-terangan memperlihatkan tujuan awal kelompoknya. Pada puncak kekukasaanya, barulah kita bias tahu apa tujuan yang sebenarnya. Tapi dalam kasus VOC ini misanya, ada 2 kemungkina yang terjadi. Kemungkina yang pertama adalah kelompok ini memliki tujuan

terselubung dari awal. Kemungkinan kedua adalah tujuan terselubung ini muncul ketika di tengah perjalanan. Tanpa disadari dengan tumbuhnya kelompok itu, barulah muncul tujuan lain.

Kedua kemungkinan ini bisa saja terjadi mengingat banyaknya ketidaktahuan dan kerahasiaan pada suatu kelompok.

3. MASA KEMERDEKAAN

Lanjut pada era kemerdekaan, kelompok kepentingan ini mulai muncul lebih banyak. Tapi sebelum kita membahas era kemerdekaan, sedikit kita singgung terbentuknya kemerdekaan adalah hasil dari kelompok kepentingan. Peristiwa belanda kemudian diganti oleh jepang, sebenarnya sudah muncul partai-partai yang memiliki tujuan tertentu yang kemudian menjadi salah satu penyebab dari kemerdekaan indonesia. Bisa dilihat dari mulai terbentuknya *IndischePartai.*

Demokrasi Liberal Indonesia dan Belanda menempuh jalan Diplomasi sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah melalui jalan damai. Bentuk diplomasi yang telah dilakukan Belanda dan Indonesia salah satunya ialah jalan Konverensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949. Adapun beberapa hasil yang didapatkan dari KMB ini ialah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, bentuk negara NKRI berubah menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat), dibentuknya Uni Indonesiaa Belanda dengan Ratu Belanda sebagai Ketuanya, penyelesaian konflik Irian Barat ditangguhkan 1 tahun setelah KMB, utang Belanda dibayar oleh Indonesia, kapal untuk berperang terhadap Belanda dibawa dari perairan Nusantara, dan bekas anggota KNIL menjadi anggota TNI. Dari sekian banyak kebijakan KMB yang dikeluarkan, salah satu hasil konverensi meja bundar yang paling menonjol ialah perubahan bentuk negara kesatuan Indonesia menjadi Serikat atau Republika Indonesia Serikat atau RIS. Pada masa itu Indonesia dibagi hingga 7 bagian, namun masa berlakunya bentuk Republik Indonesia Serikat ini bertahan sebentar, bahkan tidak sampai memasuki pergantian tahun. Karena masyarakat Indonesia sadar bahwa bentuk negara serikat ini hanya taktik pihak Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. rakyat Indonesia menuntut pemerintah pusat agar mengembalikan bentuk negara Indonesia kembali menjadi Kesatuan Indonesia. atas tuntunan rakyat ini lah pemerintah pusat pda 17 Agustuss 1950 mengubah Indonesia jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta hukum yang ada pada masa itu ialah Undangg-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 50). Pada saat itu Indonesia menganut Demokrasi Liberal dengan sistem pemerintahannya Parlementer. Berkembangnya demokrasi liberal di tandai dengan adanya partai politik,

karena sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia saat itu adalah Multi-Partai. Beberapa partai besar yang terkenal diantaranya Masyumi, PNI, N U, dan PKI. Pad demokrasi liberal ini Indonesia memegang sistem pemerintahan parlementer. Parlemen ialah badan legislative atau yang sekarang dikenal ialah MPR,DPR, DPD. Ada beberapa ciri dari sistem pemerintah Parlementer, diantaranya; pertama, ketua pemerintahan dipegang oleh perdana menteri sehingga presiden hanya symbol kepala atau ketua negara dan tidak memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan. Kedua, Kabinet atau para menteri yang dipegang oleh orang di perdana menteri bertanggungjawab kepada parlement.

Ketiga, Lamanya masa jabatan kabinet tidak diatur, karena perdana Menteri bisa kapan saja dijatuhkan oleh parlement dengan Mosie tidak percaya terhadap kinerja dan kebijakannya. Selama era Demokrasi Liberal, beberapa kali terjadi pertukaran kabinet dalam kurun waktu 9 tahun mulai dari tahun 1950 hingga 1959 Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Diantara 7 kebinet tersebut ada beberapa kabinet yang unggul, diantaranya ; Pertama, kabinet Natsir. Masa jabatannya hanya bertahan 6 bulan saja dari tanggal 6 sepetember 1950 dan berakhir pada 20 Maret 1951. Jatuhnya kebinet Natsir disebabkan karena kegagalan menyelesaikan Irian bagian Barat dan adanya Mosie tidak percaya dari PNI terkait pencopotan pemerintah yang dianggap terlalu menguntungkan partai Masyumi. Akan tetapi dibalik itu terdapat program kerja kabinet Natsir yang patut kita banggakan, yaitu pada masa ini Indonesia berhasil masuk menjadi anggota PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Kedua, kabinet Sukiman. Beliau mengawali masa jabatannya pada 27 April 1951 dan berakhir pada 3 April 1952. Pada masa kabinet Sukiman banyak sekali terjadi masalah dalam bidang politik yang mengakibatkan kabinet ini dijatuhkan ialah penandatangan kerjasama yang dilakukan oleh menteri luar negeri ialah Ahmad Soebarjo dengan seorang duta besar Amerika dalam Undang-Undang kerjasama keamanan. Perjanjian tersebut berisikan tentang pemberikan bantuan berupa ekonomi hinggga militer dari negara AS untuk nusantara, dimana kerjasama tersebut dianggap bertolak belakang dengan politik luar negeri bebas aktif yang dipegang oleh Indonesia yang mengakibatkan kabinet Sukieman dianggap membela Blok Barat yang saat itu sedang terjadi perang dingin dengan Blok Timur, akhirnya parlemen pun menggugat dan menjatuhkan kabinet Sukiman. Ketiga, kabinet Wilopo. Pada 3 April 1952 memulai jabatannya sampai 30 Juli 1953 yang mana kebinet ini bertahan hanya 15 bulan lebih lama daripada kabinet kabinet sebelumnnya. Kebinet ini merupakan koalisi dari partai PNI dan Masyumi, dan dalam kabinet

ini juga dibentuk kebinet ZAKEN yaitu suatu kebinet yang menteri-menterinya berasal dari kalangan ahli bukan dari partai politik. Akan tetapi, pada masa kabinet Wilopo terjadi krisis ekonomi karena adanya kegiatan eksport impor yang tidak terkendali, serta munculnya berbagai gerakan separatisme yang mengganggu stabilitas pemerintahan.

Yang ujungnya kabinet ini berakhir karena adanya peristiwa di Tanjung Rawa, Sumatera Selatan, dimana pemerintah menyerahkan kembali tanah Deli Planters Vereeniging dan mengarahkan polisi untuk mengusir para petani yang menggarap tanah tersebut. Keempat, kabinet Ali Sostramijoyo ke-I. masa jabatannya dimulai dari 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955. Kabinet ini sangat berperan dalam eksistensi Indonesia di kanca Internasional yang salah satunya terlaksanakannya konferensi Asia Afrika di Bandung 1955. Kabinet ini juga berhasil membatalkan utang Indonesia ke Belanda. Kabinet ini turun akibat dari pengangkatan TNI AD terhadap Bang-Bang Utojo sebagai kepala staf yang tidak disetujui oleh petinggi-petinggi TNI AD. Kelima, kabinet Burhanuddin. 12 Agustus 1955 beliau memulai jabatannya sampai 3 Maret 1956. Kebinet ini berhasil menyelesaikan konflik TNI AD dan juga berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 untuk memilih DPR serta anggota Dewan Konstituantisme. Konstituante merupakan sebuah dewan yang dibentuk hingga bertugas dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru penggati UUSD 50 yg masih bersifat sementara. Berakhirnya kabinet ini bukan karena mengundurkan diri ataupun dibubarkan, melainkan tugasnya yang dianggap selesai. Keenam, kabinet Ali Sastroamijo ke-II. Untuk kedua kalinya Ali S dipilih oleh presiden Soekarno sebagai perdana menteri. Masa jabatan yang dipegang ialah pada 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Beliau berkoalisi dengan partai besar seperti PNI, Masyumi dan NU, sedangakn partai PKI tidak dilibatkan karena ditolak oleh tokoh-tokoh Islam. Pada kabinet ini dianggap tidak tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan separatis diberbagai daerah. Ketujuh, kabinet Djuanda. Masa jabatannya dimulai pada 9 April 1957 dan berakhir pada 10 Juli 1959. Kabinet ini dibentuk dnegan jajaran menteri yang berasal dari kalangan ahli bukan dari partai politik. Pada masa kabinet Djuanda.

Banyak program kerja yang terrealisasikan, salah satunya berhasil menyarakan kepada dunia mengenaipenetapan batas laut Teritorial Indonesia, peristiwa ini disebut dengan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Sedangkan masalah dihadapi oleh kabinet Djuanda ialah adanya peristiwa percobaan pembunuhan terhadap presiden Soekarno di Cikini tahun 1957. Dan siding dewan Konstituante yang tidak kunjung selesai. Sebelum masa kabinet

Djuanda dimulai, Soekarno telah mengadakan Sidang Dewan Konstituante pada tahun 1956 dengan tujuan menghasilkan UUD yang baru. Namun, sampai tahun 1959 Dewan Konstituantisme masih belum mengeluarkan Undang-Undang Dasar yang baru.

5. MASA ORDE LAMA

Demokrasi Terpimpin Pada saat itu, demokrasi liberal dianggap tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang pada akhirnya Soekarno menggantinya dengan Demokrasi Terpimpin. Dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan politik di Indonesia. Sehingga pada tanggal 14 bulan November tahun 1945 sistem pemerintah yang ada di Indonesia berubah dari system parlementer jadi system presidensial, sebagai usaha untuk menghilangkan kesan bahwa presiden Soekarno bukanlah actor tunggal, yang pada akhirnya posisi presiden Soekarno berubah menjadi kepala negara bukan kepala pemerintahan lagi, dan posisi kepala pemerintah diambil alih oleh Perdana Menteri, sehingga membentuk Republik Indonesia Serikat, yang didalamnya terdapat tiga Perdana Menteri ialah Sultan Syahrir, Amin Syarifudin, dan Hatta (Magenda, 2005). Menurut salah seorang sejarawan Ahmad Sari'I Ma'arif berpendapat bahwa demokrasi terpimpin ini memiliki tujuan khusus untuk menetapkan Soekarno sebagai presiden RI, sehingga dianalogikan sebagai bapak dalam suatu keluarga dengan segala kekuasaan didalamnya. Akan tetapi terdapat kekeliruan dan mengingkari nilai-nilai demokrasi, yakni hidupnya absolutisme hingga putusnya suatu kekuasaan terhadap pemimpin. Sekitar tahun 1950 terjadi suatu perdebatan mengenai perubahan konstitusi yang mana UUD 1945 diubah menjadi UUDS 1950.

UUDS 1950 ini bertahan hanya beberapa waktu saja, sehingga diberlakukannya kembali sekitar tahun 1959 menjadi UUD 1945 lagi. Hal ini terjadi sama seperti hal nya pemberlakukan system politik UUDS 1945 pada masa demokrasi parlementer tanggal 14 November 1945. Awal Juli 1959 Soekarno melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan seperti ketua DPR, para Mentri, pimpinan TNI, anggota dewan Nasional, dan tokoh penting lainnya untuk mendiskusikan langkah yang akan diambil untuk masa depan bangsa Indonesia. Setelah melakukan suatu tertemuan tersebut, mereka sepakat bahwa UUD 1945 akan digunakan kembali. 5 Juli 1959 pertemuan dilanjutkan sekaligus memunculkan suatu Dekrit Presiden upaya dalam mencari jalan pintas dari kebutuhan sistem politik melalui pemetaan kepemimpinan personal yang kokoh. Yang didalamnya terdapat suatu hal mengenai pembubaran dewan konstituansi, UUD 1945 diberlakukan kembali,

sehingga UUDS 1950 berhenti dibelakukan dan penataan suatu MPRS dan DPAS.

Ini menjadi tanda bahwa berakhirnya Demokrasi Liberal dan mulai diberlakukan Demokrasi Terpimpin. Pada HUT RI tahun 1959, jenderal Soekarno berpidato mengenai "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Dalam pidatonya, jenderal Soekarno menyampaikan suatu motivasi untuk terus berrevolusi, keadilan bagi sosial, serta penyusunan ulang terhadap organisasi dan lembaga negara bagi revolusi yang terus berkaitan. Adapun pidato ini dikenal dengan nama Manipol atau Manifesto Politik. Dengan perkembangannya manipol usdek dijadikan sebagai ideology resmi pada masa demokrasi terpimpin ini dan dijadikan sebagai garis besar haluan negara. Salah satu partai politik terbesar pada system parlementer ialah Masyumi (Majelis Syura Muslim Indonesia) yang dibubarkan pada saat itu, karena mereka dianggap memiliki keterkaitan dalam pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sedangkan Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan mengenai NASAKOM (Nasional, Agama, dan Komunis) dengan tujuan ingin menyatukan tiga kekuatan dibawah pimpinannnya itu. Hal ini dimanfaatkan langsung oleh partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menguatkan keberadaannya dalam system politik di Indonesia. PKI sendiri telah meyakinkan presiden Soekarno bahwa mereka adalah partai pendukung utama pada kebijakan pemerintah. Adanya gerakan yang dilaksanakan oleh PKI tanggal 30 September 1965 atau peristiwa dikenal dengan nama G30S/PKI. Peristiwa G30S/PKI dilatar belakangi oleh ketidakstabilan politik pada masa demokrasi terpimpin dimana kebijakan-kebijakan politik Soekarno telah membawa Indonesia mendekat ke blok Timur yaitu politik luar negeri seperti Jakarta-PekingPyongyang.

Pasca tragedy G30S/PKI di Indonesia mengakibatkan kondisi politik yang tidak konsisten, sehingga keyakinan rakyat Indonesia kepada pemerintahan Sukarno semakin rapuh. Setelah mengetahui hal ini TNI Angkatan Darat tidak tinggal diam, dimana mereka melakukan perencanaan dalam pemberantasan DN Aidit, ketua PKI dan melarang penerbitan Harian Rakyat. Akan tetapi, rencana tersebut mendapat protes dari Presiden Soekarno, yang mana TNI AD diminta untuk mencabut perencanaan tersebut dan Soekarno pun meminta untuk tidak melarang hal apapun yang dilakukan oleh pihak PKI. Sehingga suasan politik pun semakin memanas antara TNI AD, tokoh-tokoh politik dan Presiden Soekarno. Namun perseteruan itu segera diakhiri mengingat Indonesia saar itu sedang focus pada konfrontasi dengan Malaysia.

6. MASA ORDE BARU

MPRS mengangkat jenderal Suharto sebagai presiden pada 27 Maret 1968 dengan tugas utama menyelenggarakan pemilu. Soeharto menamakan masa kepemimpinan ini sebagai masa Demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Melihat banyaknya penyimpangan yang terjadi pada masa sebelumnya, Soeharto memutuskan suatu tekad untuk memperbaiki sistem politik di RI dengan memfokus pada UUD 45 dan Pancasila secara keseluruhan, murni, dan konsekuwen yang selama ini dianggap masa pemerintahan sebelumnya tidak seutuhnya melaksanakan Pancasila dan UUD 45 sebagai asas hukum. Maka dari itu, dengan naiknya Soeharto sebagai presiden memiliki tujuan untuk menyusun kembali peraturan agar sistem politik di Indonesia kembali berjalan dengan stabil sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Paham demokrasi Pancasila dianggap cocok bagi kerpibadian Indonesia yang dapat dilihat melalui kehidupan sosial budaya yang ada di Indonesia sendiri, dimana hal itu dikembangkan secara aktif turun temurun sebelum negara Indonesia merdeka. Ini semua dapat kita saksikan sendiri pada kehidupan masyarakat yang masih menggunakan sistem mupakat serta silih bantu diantara mereka dalam suatu problemalitas. Kehidupan pada masa dekomrasi Pancasila pada hakikatnya terpampang jelas pada Pancasila ialah sila ke empat, yang berbunyi: “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”.

Ini dapat dijadikan suatu bukti adanya keterkaitan antar sila satu dengan sila yang lain. Pada 11 Maret 1966 Jenderal Soekarno membuat konsep surat suatu perintah yang ditujukan terhadap Suharto, yang dimana perintah itu kita kenal pada istilah SUPERSEMAR atau Surat Perintah Sebelas Maret. Supersemar ini berisikan suatu mendat kepada Soeharto selaku panglima TNI AD untuk memulikan kondisi politik dan tinggian pemerintahan agar terciptanya status damai, terkendali bahkan stabil dari kerusuhan yang terjadi diberbagai daerah. Langkah awal pertama yang gerakan oleh jenderal Suharto sesudah memegang mandat Sepersemar tersebut salah satunya ialah beliau membubarkan langsung Partai Komunis Indonesia (PKI) dan melarang berjalannya organisasi masa yang berlindung atau sejalan dengan PKI di seluruh Indonesia dan pembubaran ini mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Sejak mengemban mandat Supersemar, nama Letjen Soeharto semakin dikenal banyak orang. Akan tetapi kondisi ini mengakibatkan munculnya Dualisme Kepemimpinan Nasional. Tanggal 22 Juni 1966 Sukarno berpidat berjudul “Nawaksara”.

Pidato ini disampaikan sebagai pertanggungjawabana atas sikapnya dalam mengahadapi G30S//PKI, akan tetapi pidato ini ditolak oleh MPRS. Bulan Juli awal tahun 1966, Supersemar dijadikan ketetapan MPRS, dengan demikian Sukarno tidak dapat mencabut Supersemar. Dan secara hukum kedudukan Soeharto sejajar dengan Soekarno sebagai mandataris MPRS. Soeharto diberi mandat oleh MPRS unruk membuat kabinat baru yang diberi nama kabinet Ampera, yang kemudian diresmikan pada 8 Juli 1966 yang berisikan suatu tugas utama dalam menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Untuk membersihkan sisa-sisa PKI, jenderal Soeharto membentuk suatu kelompok Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Kertiban (Kopkamtib) sehingga dapat dengan mudah dalam menormalkan dan mengembangkan kembali system politik yang sempat tidak baik. Dalam kebijakan-kebijakan yang ada pada periode ini melalui stabilitas politik yang mana dikeluarkannya kebijakan Dwifungsi ABRI. Selain berperan dalam bidang militer juga berperan dalam bidang sosial politik. Upaya yang dilakukan untuk menerapkan Dwifungsi ABRI ialah dengan memasukan anggota ABRI dalam keanggotaan DPR-MPR, dan juga banyak yang menjadi pejabal sipil. Hal ini menunjukan adanya dominasi militer dalam kehidupansosial politik di Indonesia pada masa ini. ABRI juga memiliki janji setia terhadap Pancasila dan UUD 45, dikarenakan angkatan bersenjata tersebut sangat berperan penting demi persatuan bangsa.

7. MASA REFORMASI

Masa Reformasi Telah kita ketahui bahwa sistem politik di Indonesia masih diselimuti oleh berbagai konflik yang terus bergulir. Seharusnya konflik yang ada dapat dikendalikan di negara Indonesia yang memegang sistem demokrasi. Setelah Presiden Soeharto menyatakan mundur dari kepresidenan dan menjabat selama 32 tahun maka pada saat itu Indonesia memulai tahap baru yaitu tahap era Reformasi. Adanya erareformasi ini sebagai harapan besar dalam kemajuan bangsa dalam pemetaan hukum hingga peraturan yang disesuaikan kembali pada Pancasila dan UUD 45. Dan juga besar harapan bangsa adanya masa ini dapat memperbaiki dan menata ulang konflik politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sempat terjadi pada sistem politik di Indonesia sebelumnya. Pada masa awal Reformasi pemerintahan Indonesia telah melewati beberapa periode, diantaranya ; peride pemerintahan BJ Habibie, periode pemerintahan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, periode pemerintahan Megawati, hingga periode pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono. 21 Mei 1998 merupakan suatu kejadian dimana mundurnya Suharto

sekaligus dilantiknya BJ Habibie menjadi presiden selanjutnya. Setelah dilantik, presiden Bj Habibi menyampaikan pidato pertamanya beliau menyerukan suatu tekadnya untuk menjalankan masa reformasi. Dimana dalam pidato tersebut berisi tentang visi kepemimpinannya guna melaksanakan tuntunan repormasi yang tepat dan cepat.

Presiden BJ Habibie menyusun kebijakan yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan pada pada tanggal 22 bulan Mei tahun 1998. Kebijakan ini dikeluarkan oleh BJ Habibie salah satunya dalam bidang Politik, yang mana beliau berupaya merubah budaya politik yang mewarisi pemerintahan sebelumnya. Pada periode pemerintahan BJ Habibie ini terdapat kejadian besar yang terdapat dimasa ini, ialah dilaksanaknnya Referendum di Timor Timur. Referendum ialah proses pemungutan suara untuk mengambil keputusan politik yang memengaruhi suatu negara. Telah kita ketahui bahwa sejak masa orde baru Timor Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia, yang pada akhirnya presiden BJ Habibie memutuskan untuk melakukan Referendum yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999, dengan tujuan untuk meyakinkan apakah masyarakat Timor Timur mengambil pilihan kemerdekaan atau otonomi. Hasil referendum diumumkan oleh PBB pada tanggal 1999 yang beisikan bahwa 78.5% rakyat Timor Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia dan resmi lepas dari Indonesia pada 19 Oktober 1999. Tahap memilih Presiden dan Wakil Presiden tahun 1999 dilaksanakan pada sidang paripurna melalui pemungutan suara anggota MPR. Abdurrahman Wahid berhasil memenangkan pemilihan suara dan secara resmi terpilih menjadi presiden Indonesia yang ke-4 pada 20 Oktober 1999.

Adapun beberapa kebijakan pada masa ini dalam bidang hukum dan pemerintahannya, yang mana beliau menyampaikan kebijakan berupa membubarkan departemen pemerangan serta departemen sosial untuk mencapai tujuan pelurusan struktur suatu pemerintahan. Lalu kebijakan Amandemen Undang-Undang Dasar 45, pada 18 Agustus 2000. Amanndemen reformasi bersangkutan dengan suatu susunan pemerintah pusat, provinsi, kota, kabupaten. Diakhir periodenya, pada 21 Juli 2001 atas permintaan DPR, MPR melaksanakan sidang istimewa yang dipegang oleh Amin Rais dengan agenda untuk memberhentikan Gus Dur sebagai presiden RI. Disisi lain Gus Dur menyampaikan bahwa dirinya tidak akan mundur dari jabatan kepresidenannya. Merasa dirinya terancam maka Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden 22 Juli 2001, akan tetapi dekrit tersebut tidak dilaksanakan. Kemudian singkatnya Gus Dur dianggap melanggar otoritas negara dikarenakan tidak menghadiri bahkan menolak untuk berpidato mengenai pertanggung jawabannya pada sidang

istimewa MPR, sehingga Gus Dur diberhentikan oleh MPR sebagai presiden Indonesia Setelah Gus Dur berhenti menjadi presiden, maka Megawati Soekarno Puteri diangkat sebagai presiden Indonesia ke lima pada 23 Juli 2001. Salah satu dari sekian banyak nya kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden Megawati ialah dibidang Ekonomi, yang mana krisis ekonomi di Indonesia dari tahun 1998 tidak teratasi oleh dua pemerintahan sekaligus.

Presiden Megawati dianggap berhasil membangun kembali perekonomian Indonesia hal ini dibuktikan dengan tingkat harga dan suatu nilai tukar rupiah pada dollar Amerika Serikat rendah sehingga dapat berdampak pada stabilnya harga barang-barang. Presiden Megawati dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudoyono pada pemilu tahun 2004, sehingga Susilo Bambang Yudoyono diangkat menjadi presiden Indonesia ke enam dan juga presiden pertama yang dipilih langsung oleng rakyat Indonesia. Pada priode pemerintaha SBY membentuk kabinet yaitu "Kabinet Indonesia Bersatu", yang mana ada beberapa kebijakan pada periode ini. Salah satu kebijakannya yaitu dalam bidang Politik yang berisikan membentuk sekertariat gabungan (Setgab) untuk menciptakan pemerintahan yang solid dan memiliki visi misi yang sejalan. Memperluas wewenang pemerintahan daerah dan mengurangi wewenang pemerintahan pusat secara seimbang. Mengupayakan birokrasi yang transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Presiden SBY selalu berusaha dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu mengembangakan komunikasi yang baik bersama rakyat Indonesia dengan cara memfaatkan media sosial yang telah ada.

B. Tujuan dan Cara mempengaruhi pemerintahan

Dalam politik di Indonesia kita bisa menulis sangat tidak ada beberapa tujuan dari kalangan keinginan. Dini, ialah kalangan keinginan merepresentasikan konstituen mereka dalam mempengaruhi skedul politik. Di mana melalui loby- loby yang dicoba diharapkan berdampak pada tujuan yang ingin mereka dapat. Kedua, kalangan keinginan memberikan peluang buat anggotanya untuk turut dan dalam metode politik. Minimun menyangkut satu rumor khusus, anggota- anggotanya bisa ikut serta dalam pengaruhi administratur penguasa. Ketiga, menolong ceria orang ataupun warga yang jadi anggotanya buat siuman kepada isu- isu khusus, alhasil mempunyai tindakan yang serupa dengan badan yang lain. Keempat, menolong orang buat mengutip aksi kepada isu- isu khusus, alhasil bisa jadi atensi biasa. Kelima, golongan kebutuhan bisa jadi evaluator atau pengawas kepada program- program

penguasa. Mereka dapat memperhitungkan kekurangan- kekurangan program penguasa, dan membagikan masukanmasukan.

Syukur- syukur masukan yang di informasikan jadi skedul legislatif atau agensi- agensi penguasa yang lain buat tingkatkan kualitas pelayanannya. Dalam mengantarkan aspirasinya pada penguasa, golongan kebutuhan umumnya menempuh 2 tahap(Jordan and Malanoey 2007: 39- 40). Awal, mereka mengantarkan isu- isu yang telah diartikulasikan sedemikian muka buat“ dibeli” partai- partai politik. Tahap ini umumnya ditempuh bila sistem politik yang terdapat berjalan dengan cara demokratis serta terbuka, di mana partai- partai politik bersaing dengan cara segar serta tingkatan keyakinan warga kepada partai politik lebih besar dibanding golongan kebutuhan. Tidak hanya itu, metode cheks and balances di antara lembaga- lembaga politik pula berjalan bagus. Dalam atmosfer semacam ini, golongan kebutuhan hendak bisa maksimum melaksanakan pendekatan dengan partai politik serta melaksanakan cara payau berunding buat mengupayakan kepentingannya.

Kedua, golongan kebutuhan langsung mengantarkan harapan yang telah diartikulasikan pada penguasa. Cara ini umumnya didahului oleh terdapatnya perbincangan atau kontroversi yang besar dalam warga, spesialnya lewat alat massa. Sering- kali beberapa badan golongan kebutuhan terencana“ meletuskan” satu rumor khusus ke alat massa supaya jadi atensi biasa, alhasil penguasa ikut mengutip atensi. Metode ini ditempuh bila sistem politik tidak berjalan dengan cara terbuka serta partai- partai politik tidak dapat melaksanakan fungsi- fungsinya dengan cara maksimum.

Tingkatan keyakinan warga kepada partai politik pula kecil. Untuk golongan kebutuhan hendak percuma saja ataupun tidak efisien bila mengantarkan aspirasinya lewat partai politik. Sebab itu, upaya pendekatan langsung kepada pejabat- pejabat penguasa dirasa lebih efisien serta berarti. Ada pula metode ataupun strategi yang digunakan buat pengaruhi penguasa merupakan. Awal, melaksanakan lobbying menjalakan komunikasi langsung dengan para administratur penguasa yang terpaut, atas rumor yang diperjuangkan. Wise Cummings mendeskripsikan lobby selaku, communication with legislator or other government officials to try to influence their decision(Cummings 192: 217). Bersumber pada arti itu lobby bukan sekedar tertuju kepada pejabatpejabat legislatif saja namun pula cabangcabang rezim yang lain. Kelompok- kelompok kebutuhan, spesialnya yang kokoh, tidak tidak sering mempunyai peloby- peloby spesial ataupun carter(melunasi) seseorang peloby professional yang mempunyai keahlian spesial di aspek itu. Kegiatan lobby membutuhkan keahlian spesial serta jaringan pergaulan besar. Aspek ini lebih

ialah satu seni dari ilmu. Pekerjaan peloby di beberapa negeri maju sudah jadi bagian dari profesi sah yang sebanding dengan pekerjaan moderen yang lain.

Kedua, lewat alat massa. Golongan kebutuhan umumnya memakai alat massa selaku alat buat menarik afeksi dan atensi biasa, alhasil penguasa mengutip kebijaksanaan atas rumor khusus cocok yang di idamkan. Pesan-pesan yang di informasikan lewat alat diharapkan lekas menemukan reaksi yang mencukupi dari penguasa. Tetapi lewat metode ini tidak terdapat kontak langsung dengan administratur penguasa. Ketiga, grass- roots pressure, di mana golongan kebutuhan menggalang sokongan warga bungkus dasar buat mengantarkan isu- isu khusus. Misalnya lewat rapat akbar, karnaval massal, unjuk rasa, kelakuan teatrikal di tempat- tempat biasa atau bangunan penguasa. Lewat metode ini memanglah terdapat kontak langsung dengan administratur penguasa, namun terbatas, serta bisa jadi saja manipulatif serta situasional. Adakalanya golongan kebutuhan memakai ketiga metode di atas dengan cara berbarengan dalam pengaruhi penguasa. Perihal itu dicoba selaku metode yang bisa jadi ditatap efisien menyangkut isu- isu khusus, paling utama sekali kelompokkelompok kebutuhan dengan sumberdaya yang mencukupi, bagus badaniah ataupun nonmaterial.

Tetapi begitu, kesuksesan golongan kebutuhan dalam pengaruhi skedul penguasa mempunyai kandungan yang berbeda- beda antara satu sistem politik dengan sistem politik yang lain, dari satu negeri dengan negeri lain, dari satu durasi ke durasi yang lain. Oleh sebab itu, terdapat sebagian pandangan yang ikut memastikan akibat golongan kebutuhan, ialah: Pandangan kultur politik, bentuk kelembagaan, karakter serta sistem partai, karakter serta style dalam kebijaksanaan khalayak(Janda, Berry& Goldman 1997: 73). Bila dalam sesuatu warga peran golongan kebutuhan ditatap asli serta positif, hingga keikutsertaan individu- individu buat berasosiasi di dalamnya hendak didorong, serta cara politik yang mengaitkan golongan kebutuhan ditatap selaku alami. Sedangkan bentuk kelembagaan membayangkan kalau bila bentuk kewenangan sesuatu negeri terdistribusikan dengan cara beraneka ragam ataupun plural di antara kelompok- kelompok, hingga itu hendak membagikan tempat yang positif untuk golongan kebutuhan. Dengan tutur lain, rezim yang terbagi- bagi, di mana tidak terdapat satupun golongan yang dapat memimpin hendak lebih mendukung untuk tumbuhnya kelompok- kelompok kebutuhan.

Sebaliknya aturan kelembagaan yang tersentralisasi malah mengganggu kehadiran golongan kebutuhan. Pada pandangan sistem politik, bila sesuatu sistem politik berkelakuan demokratis hingga hendak gampang untuk kelompok- kelompok kebutuhan buat populer. Terdapatnya sistem politik

dengan corak kepartaian berkuasa ataupun hegemonik hendak dengan cara natural mengarah mempersempit ruang golongan golongan kebutuhan. Sedemikian itu pula kebalikannya, bila sesuatu sistem politik itu nondemokratis hingga kira- kira berat untuk kelompok- kelompok kebutuhan mengorganisir dengan cara ikhlas, tanpa dikooptasi oleh penguasa. Rezim- rezim absolut terbiasa buat melaksanakan kooptasi dalam bagan memenangkan sokongan selaku metode buat menaklukkan warga semenjak dini. Karakter serta style pengumpulan kebijaksanaan khalayak berarti kalau dalam bagian khusus tindakan intervensionis sesuatu penguasa hendak membagikan akibat pada pelibatan kelompok- kelompok kebutuhan dalam formulasi kebijaksanaan khalayak. Di beberapa negara- negara Eropa Barat, paling utama Skandinavia, tindakan intervensionis penguasa menghasilkan kelompok- kelompok kebutuhan dengan cara kelembagaan mempunyai keakraban dengan unit- unit dalam rezim dengan cara ajeg. Sedangkan di beberapa negara- negara yang lain yang style pengumpulan kebijaksanaan rejim lebih bebas serta kebal kepada akibat area politik, pelibatan golongan kebutuhan dalam pembuatan kebijaksanaan khalayak mengarah kurang. Penguasa kira- kira berjarak dengan golongan kebutuhan. Tidak hanya itu, dengan cara dalam efektifitas golongan kebutuhan dalam pengaruhi penguasa pula didetetapkan oleh; Keahlian dalam memobilisasi sokongan, daya, serta sumberdaya badan; pula luasnya sumberdaya yang dipunyai, semacam keahlian keuangan, jumlah badan, kecakapan politik, kesatuan badan, gengsi di mata warga serta para kreator ketetapan rezim(Almond 2000: 60).

C. Kedudukan dan simtem politik

Peran golongan kebutuhan dalam sistem politik merupakan terdapat di antara penguasa dengan warga. Letaknya terletak di tengah selaku jembatan yang mengaitkan antara kepentingan- kepentingan warga serta penguasa. Posisi penyampaian harapan itu bisa ditafsirkan selaku selanjutnya:

Sebab peran yang semacam itu, hingga golongan kebutuhan menaiki posisi yang stategis selaku penghimpun, agen, sekalian perumus harapan. Dalam kondisi sistem politik, kehadiran golongan kebutuhan ini sudah melahirkan perbincangan, bagus dari pihak pluralis ataupun terpandang. Golongan pluralis memandang kalau intisari dari kerakyatan merupakan penyebaran kewenangan di tangan kelompokkelompok alhasil tidak terdapat satupun daya yang memimpin. Tiap orang pada Kenyataaannya berpotensi buat mengorganisir diri dan mempunyai akses yang serupa ke dalam rezim. Penajaan kewenangan hendak hadapi bias oleh kepentingankepentingan khusus, bila tanpa terdapat penyeimbang energik dari unsur unsur dalam warga.

Kedatangan kelompok- kelompok malah dibutuhkan buat berdialog, berdebat, sekalian didengar serta dikritik. Dengan tutur lain, di mata kalangan pluralis kerakyatan merupakan kompetisi di mana tiap- tiap golongan dengan cara leluasa serta sebanding memajukan kepentingan- kepentingannya, dan silih pengaruhi satu serupa lain. Bentuk yang sangat dekat dengan ilham itu merupakan kerakyatan golongan dalam wujud bentuknya kelompok- kelompok kebutuhan.

Terdapatnya kalangan keinginan justru akan memantapkan energi masing- masing kalangan untuk silih mengimbangi. Dalam perspektif ini, kehadiran politik kalangan dipandang positif, dan diperlukan berlaku seperti pengganti, dari wujud kewarganegaraan determinasi yang beradat konvensional, yang dimonopoli partai- partai politik. Aspirasi- harapan konstituen kerapkali terlempar sedemikian itu determinasi lazim selesai, dikalahkan oleh skedul lain yang lebih menarik. Determinasi lazim dan partai saja tidak menjamin keseimbangan negara- negeri demokratis. Adanya kalangan aktif berbagai jenis dan format, amat berarti biar bisa melindungi metode kewarganegaraan dan biar para warga negara dapat memajukan tujuan-tujuan mereka. Pandanganpandangan pluralis antara lain berawal dari pemikiran tokoh- figur sejenis, James Madison, salah satu papa penggagas Amerika, dan pula teoritisi politik moderen Robert Dahl. Golongan pluralis memandang jika, kekuasan politik sebaiknya tidaklah saja di tangan elektorat ataupun kalangan elit tetapi disebar ke seberinda masyarakat. Tidak cuma itu, perspektif pluralis beriktikad jika kalangan keinginan yakni representasi asli kewarganegaraan.

Karena di situlah orang dengan lapang berorganisasi, berdialog, dan menggalang energi sendiri dengan metode teratur. Sebaliknya aktivitas pemilu sering- kali tidak cukup buat masyarakat untuk mengkomunikasikan dan membawakan pesannya dengan metode utuh dalam masa yang cukup. Adanya keinginan bersaing yang berbeda- beda ialah dasar buat keseimbangan kewarganegaraan serta perkembangan positif buat kebijaksanaan khalayak(Hays 2011: 121). Sebaliknya kalangan perspektif elit memandang kehadiran kalangan keinginan dari akhir pandangan yang berbeda. Meski perspektif ini membetulkan sebagian argumen- alasan pluralis, namun tidak akur dalam beberapa pemikiran yang lain. Kalangan terkemuka memandang jika bentuk wewenang di manapun akan melahirkan energi kecil spesial berlaku seperti kalangan pembatas ataupun dampak.

Pandangan ini untuk sebagian berawal dari filosofi Hukum Besi Oligarki Michels. Di berbagai pandangan, mereka tidak akan segan- enggan

mengkonsolidasikan diri, bersatu untuk menancapkan dampak ataupun dominasinya. Energi mereka beradat keras, serupa, monolitik, terencana, distribusi wewenang berjalan dari atas ke bawah, di mana kalangan kecil ini jadi otak. Perspektif terkemuka berargumen jika, aktivitas kalangan keinginan membutuhkan sumberdaya material dan finansial yang tidak sedikit.

Sekecil apapun, sesuatu golongan kebutuhan tentu membutuhkan dasar keuangan yang kokoh, supaya bisa bertahan. Sumberdaya keuangan itu dengan cara natural cumalah dipunyai oleh segerombol kecil badan ataupun pengurusnya. Mereka tidak bisa jadi memberikannya dengan cara free tanpa tendensi apapun. Sebab itu, lahirnya golongan kebutuhan dalam banyak pandangan lebih menggantikan kebutuhan sedikit orang itu, paling utama pengurusnya atau anggota- anggota kuncinya yang mampu melunasi iuran. Lagi pula pemahaman buat berbaur ataupun aktif dalam satu badan dalam derajat khusus cumalah dipunyai oleh banyak orang yang mempunyai komitmen siuman serta memiliki duit dan durasi senggang(Loomis 2011: 184). Sedangkan untuk mayoritas orang miskin tidak bisa jadi mereka membuat golongan kebutuhan yang kokoh, mengenang sumberdayanya yang terbatas.

Lahirnya kelompok- kelompok kebutuhan eksklusif, atau assosiasional dalam sebutan Almond serta Powell, jadi petunjuk kuat

kalau banyak orang yang memiliki duit ini sajalah yang dapat mengantarkan aspirasinya ke penguasa lewat pembentukan- pembentukan golongan. Untuk kalangan terpandang, golongan kebutuhan lebih memantulkan bias kebutuhan golongan, spesialnya kalangan atas, dan ialah cacat untuk kerakyatan. Dalam pemikiran perspektif ini, badan serta institusi bisa menempuh“ hidup mereka sendiri” yang bisa membuat mereka menyimpang, seperti diramalkan Weber, dari kemauan serta kebutuhan badan mereka. Terdapat kecondongan oligarki, di mana bentuk birokrasi bisa membeku serta para atasan jadi elite- elite yang tidak paham pada zona swasta ataupun negara. Akhirnya, kebijaksanaan khalayak dapat doyong ke arah golongan kebutuhan khusus yang mempunyai badan terbaik serta sumberdaya paling banyak, dapat doyong ke arah agensi- agensi negeri yang dengan cara politik kokoh, serta dapat dibelokkan oleh kompetisi yang hebat dampingi sektor- sektor berlainan dari rezim itu sendiri(Hays 2011: 122).

Pengumpulan ketetapan selaku suatu cara hendak senantiasa menemukan akibat serta dorongan dari bermacam aspek, tercantum kompetisi politik yang keras, strategi penentuan biasa, sumberdaya yang sangat jarang, dan wawasan serta kompetensi yang kurang. Terdapatnya banyak pusat kewenangan tidak menjamin kalau penguasa hendak:(1) mencermati mereka

seluruh dengan sebanding;(2) melaksanakan apapun tidak hanya berbicara dengan atasan pusat- pusat itu,(3) gampang terserang akibat siapapun tidak hanya mereka yang terletak di posisi- posisi yang kokoh,(4) melaksanakan apapun mengenai isu- isu yang lagi diulas(Lively 2005:: 20- 24, 54- 56). Walaupun ada beberapa besar golongan kebutuhan yang mengklaim berjuang buat warga, tetapi dalam faktanya, pandangan hidup serta arah yang diusungya, sedikit banyak memiliki bias kebutuhan. Sebab itu untuk perpektif ini, orang miskin ataupun massa tidak bisa jadi dengan cara instrumental mengorganisir diri dengan keterbatasan sumberdaya. Ternyata golongan kebutuhan berperan selaku media agen harapan, ianya malah lebih ialah perlengkapan kebutuhan kelompokkelompok ataupun sub- sub golongan atas dalam warga buat lalu memimpin.

1. Perkembangan dan Pertumbuhan Kelompok Kepentingan

Sejarah Kelompok Kepentingan di Dunia Kelompok kepentingan sesungguhnya telah lama muncul dalam kehidupan politik moderen dalam berbagai bentuk gerakan maupun organisasi kepentingan. Dalam politik di negaranegara maju seperti di Inggris ditandai dengan munculnya organisasi seperti Masyarakat Abolisi yang menentang perdagangan budak yang dibentuk di tahun 1780-an, yang kemudian diikuti organisasiorganisasi di bidang lain. Di Amerika Serikat gerakan itu ditandai dengan munculnya berbagai asosiasi dalam masyarakat yang bermaksud membela kepentingan-kepentingan kelompok, berhadapan dengan pihak Inggris maupun pertumbuhan pemerintahan Amerika pada masa-masa awal (Cigler and Loomis 2011:8). Perkembangan demokrasi di Amerika Serikat tumbuh subur dan berakar kuat, salah satunya karena didukung oleh munculnya asosiasi-asosiasi masyarakat tersebut. Kondisi ini sepertimana dikemukakan oleh pemikir Perancis Abad 19, Alexis de Tocqueville, ketika mengunjungi negara tersebut dengan menyatakan bahwa, asosiasi-asosiasi telah menjadi bagian inheren dalam budaya politik Amerika Serikat dan menjadi sumbu bagi tegaknya kehidupan demokratis, yang tidak ditemukan pada masyarakat manapun ketika itu (Tocqueville 1994:167). Pada abad ke 20, pasca perang dunia kedua di tahun 1950an dan 1960an di negara – negara barat kelompok kepentingan tumbuh menjamur seiring dengan perluasan peran pemerintah ke segala bidang kehidupan. Perluasan otoritas dan fungsi–fungsi pemerintahan, baik local maupun nasional, dalam rangka memenuhi tuntuan pembangunan telah melahirkan tanggapan dari kelompok dalam masyarakat, yang merasa harus terlibat dalam isu – isu tertentu. Hal tersebut juga seiring dengan semakin meratanya tingkat pendidikan dan kesadaran politik, serta meningkatnya keterampilan-keterampilan organisasional. Gejala ini

menunjukkan bahwa, semakin banyaknya area di mana pemerintah menjadi terlibat, maka semakin banyak pula kepentingan-kepentingan khusus yang berkembang untuk mempengaruhi kebijakan (Loomis 2011:181-182).

2. Sejarah Kelompok Kepentingan di Indonesia

Seiring perkembangan zaman suatu kelompok kepentingan dan suatu gerakan semakin bertambah dan memiliki pengaruh yang lumayan luas dalam penerapannya pada suatu negeri. Dalam suatu jalannya sistem demokrasi, kelompok kepentingan dan gerakan ialah suatu stimulan penghubung antara yang memerintah dan yang di perintah(publik). Pada kehidupan politik yang kontemporer, sebenarnya kelompok kepentingan telah lama bereksistensi dalam bentuk aksi maupun hajat perpolitikan. Seperti halnya di Inggris, Masyarakat Abolisi yang pertama kali muncul sebagai kelompok kepentingan untuk menentang perbudakan pada tahun 1780-an. Kelompok itulah sebagai pemantik kemunculan kelompok–kelompok kepentingan lainnya di bidang yang berbeda – beda. Kemunculan kelompok kepentingan tak jauh beda dengan kemunculan partai – partai politik, namun lebih dulu kelompok kepentingan yang muncul. Seperti di Indonesia, dimana kelompok kepentingan yang lebih dulu bereksistensi ketimbang partai politik. Kebanyakan kelompok kepentingan di Indonesia ini bergerak di bidang agama, ekonomi, sosial, pendidikan. Contohnya, Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam yang menjadi salah satunya kelompok kepentingan yang pertama kali lahir di Indonesia. Lalu ada Budi Utomo yang merupakan organisasi pertama didirikan oleh mahasiswa STOVIA atau Sekolah Kedokteran Batavia.

Kemudian, Taman Siswa yang berdiri karena adanya ketidakpuasan dalam sistem pendidikan yang diterapkan pada masa itu dan sebagai tanda berkembangannya pendidikan di Indonesia. Masih banyak lagi organisasi yang menjadi pelopor awal munculnya kelompok kepentingan dan sebagian juga telah bertumbuh kembang menjadi lebih besar dan cukup kuat untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Namun, pasca reformasi pada tahun 1998 barulah merajalela kemunculan kelompok kepentingan di seluruh nusantara. Dikarenakan atmosfer politik yang demokratis membuat beberapa anggota masyarakat mengemukakan pendapatnya untuk menuntut kebijkan pemerintah dalam bentuk kelompok kepentingan sebagai media untuk memengaruhi kebijakan pemerintah yang merugikan kelompoknya agar dapat diubah dengan apa yang diinginkan beberapa anggota kelompoknya. Adanya kebebasan berpendapat membuat kelompok – kelompok berkompetesi untuk kepentingannya masing – masing. Tetapi, tak semua kelompok kepentingan dapat memengaruhi kebijkan pemerintah di tingkat nasional dan juga beberapa

kelompok kepentingan yang muncul hanya ada karena isu sesaat yang beredar atau juga ada campur tangan kepentingan partai politik yang membuat mereka menjadi kelompok pendesak saja. Dalam sejarahnya, memang kelompok kepentingan ini selalu berbarengan dengan pemerintah yang berkuasa. Di Indonesia kelompok kepentingan mendapatkan tempat yang cukup banyak. Akan tetapi, tempatnya sesekali tak dimanfaatkan dengan baik dan efektif dikarenakan berbenturan dalam kepentingan kelompoknya masing – masing. Seperti terjadi di masa orde baru, A.H. Nasution mulai merasa terdapat pergeseran dalam perjuangan orde baru, yaitu terdapat dua kelompok yang bersimpangan satu sama lainnya, yaitu : Pertama, kelompok yang berstrategi stabilisasi atau keamanan demi rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. Kelompok ini merupakan kelompok militer berhaluan keras yang ingin merubah struktur politik dengan sistem dwi partai. Kelompok militer ini berkolaborasi dengan aktivis mahasiswa dan cendikiawan. Kedua, kelompok koreksi total di segala bidang politik, sosial, ekonomi, dan kultur sejalan dengan rumusan Seminar AD 1964 tentang orde baru, kelompok ini merupakan aliansi ABRI – teknorat yang kemudian berkuasa kurang lebih 32 tahun. Pada awal – awal orde baru peranan ABRI sebagai pelaksana Dwifungsi ABRI dimaksudkan sebagai pengamanan politisi – ideologis pancasila dan UUD 1945 dan dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. Dengan hubungan ini presiden Soeharto menegaskan bahwa : “Golongan Karya ABRI adalah golongan karya yang potensial dan mempunyai peran aktif dan besar untuk mengamankan Pancasila dan UUD 1945. Besar kecilnya peranan ABRI itu tergantung pada bahaya yang mengancam keselamatan Pancasila dan UUD 1945, bahaya yang mengancam keselamatan rakyat, kesatuan, dan persatuan bangsa serta kelangsungan hidup negara, baik bahaya itu datang dari luar maupun dari dalam (Soebijono, dkk., 1997 : 135). Sesudah rezim Soeharto berkuasa selama 15 tahunan, pada akhir taun tujuhpuluhan dan awal delapanpuluhan, mulailah terjadi gerakan – gerakan mahasiswa dan beberapa kelompok kepentingan yang mencurigai ABRI kea rah pemerintahan militerisme atau diktaktor militer, seperti dituduhkan dan dimuat dalam buku – buku asing. Untuk tuduhan tersebut di atas, dibantah oleh Sayidiman Suryohadiprojo, Letjen (Purn) TNI AD, intelektual – sejarah, dalam bukunya “Pancasila, Islam, dan ABRI”, 1992. Ditegaskannya, bahwa : “Terlepas dari itu, kekhawatiran bahwa akan timbul diktaktor militer dari kalangan ABRI adalah terlalu di cari – cari oleh orang – orang yang terlalu dipengaruhi oleh teori buku belaka. Belum pernah dalam sejarah TNI ada orang – orang yang menunjukan ambisi dan gerak untuk menjadi diktaktor militer”.

Selanjutnya Suryohadiprojo (1992 : 164), menyatakan: “Apalagi kalau demokrasi pancasila makin berkembang maju.

Justru disinilah letak persoalan kita bukan dalam kemungkinan Dwifungsi ABRI kea rah diktaktor militer, sebab itu perhatian kita harus kita tujukan kepada realisasi demokrasi pancasila uang lancer dan teratur”. Pernyataan diatas tidak terbukti secara empiric, karena sejarah telah membuktikan bahwa militer orde baru hanya berlindung dalam label demokrasi pancasila. Oleh karena itu dalam era demokrasi pancasila jauh dari pemerintah demokratis, terutama karena cara – cara orde baru pada kenyataannya non – demokrasi, cirinya antara lain : Pertama, Orde baru sebagai suatu oligarki kapitalis terutama tahun 1980 – 1998, negara berperan sebagai komisi yang melayani kepentingan oligarki – kapitalis (konglomerat yang sangat KKN), sehingga aparatur negara menjadi pemerintahan yang korup. Kedua, Orde baru adalah sistem hubungan antara negara dengan masyarakat yang ditandai oleh dis-organisasi kekuatan masyarakat, lemah tidak berdaya karena lebih banyak diperdaya. Ketiga, adanya sistem patrorage, mulai dari cendana sampai provinsi – provinsi, kota – kota, dan desa – desa sekaligus mengeruk sumberdayanya (Hadiz,”Menimbang Gagasan Transisi Demokrasi di Indonesia”, dalam :Gerakan demokrasi di Indonesia Pasca – Soeharto”, 2003:57). Faktor – faktor yang disebutkan diatas, merupakan realita yang menghambat reformasi demokratisasi Pasca – Soeharto, karena partai politik uang diharapkan menjadi mesin politik transisi demokratisasi, bukan merupakan suatu kekuatan reformasi sosial dengan agenda pembaharuan yang jelas. Partai politik hanya mengekspresika kepentingan para predator lama dan jaringan – jaringan barunya yang beroperasi dengan cara – cara baru untuk survive (Hadiz,2003 : 60). Apa yang kita lihat dan kita rasakan sampai saat ini, setelah bergulirnya reformasi, demokrasi, radikalisme dan kekuasaan berdampingan bahkan berhadap – hadapan, etika politik moral seolah “membenarkan” apa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. D.

Kedudukan dalam Sistem Politik Secara kodrati manusia berbeda dengan manusia lainnya, terutama dalam kepentingan – kepentingannya dan kebutuhan – kebutuhannya, mereka melakukan upaya untuk mewujudkan kebutuhan – keutuhan mereka. Melakukan kerja sama dalam berbagai asosiasi atau kelompok untuk mempermudah tercapainya kepentingan – kepentingannya. Organisasi dalam kehidupan politik diwujudkan dalam bentuk partai politik, demikian pula kelompok – kelompok yang menyangkut bidang kehidupan sosial lainnya. Tegasnya dalam berkehidupan berkelompok dan dalam hubungan dengan manusia lainnya, pada dasarnya mereka mengejar berbagai nilai yang

merupakan aktualisasi diri mereka. Dalam hubungan ini Harold Lasswell, seperti dikutip Miriam Budiardjo, mengemukakan nilai – nilai yang menjadi harapan masyarakat barat, yakni : a. Kekuasaan b. Kekayaan c. Penghormatan d. Kesehatan e. Kejujuran f. Keterampilan g. Pendidikan h. Kasih Sayang Sebelum jauh ke kedudukan, ada 5 hal yang penting mengenai pandangan politik itu, yakni : Pertama, politik adalah suatu usaha – usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudka kebaikan bersama. Kedua, politik adalah sesuatu yang menyangkut segala hal berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan (pandangan kelembagaan/institusional). Ketiga, politik merupakan segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat (pandangan berorientasi kekuasaan). Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan implementasi kebijakan umum atau pandangan yang bersifat fungsionalisme. Kelima, politik sebagai konflik dalam mencari atau mempertahankan sumber sumber penting (pandangan politik sebagai kegiatan elit politik untul memengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum). Kelompok kepentingan merupakan salah satu kekuatan penting dalam konfigurasi politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamisasikan sistem politik, dalam bentuk lahirnya politik kelompok-kelompok yang menegaskan adanya paham antar masyarakat dan kompetisi dalam masyarakat. bertitik tolak dari penjelasan tersebut, artikel ini akan membincangkan tentang kewujudan kelompok kepentingan, serta pengaruh dan kedudukannya dalam sistem politik. Sejauh ini diskusi-diskusi tentang proses politik lebih banyak ditumpukan pada partai politik. Tujuan dari kelompok kepentingan ini adalah memperjuangkan suatu kepentingan tertentu, dasarnya golongan, kelompok, atau kepentingan anggotanya. Caranya dengan berusaha memengaruhi lembaga – lembaga organisasi buruh, wartawan dan profesi lainnya. Kedudukan kepentingan dalam sistem politik di Indonesia terletak pada di antara pemerintah dengan masyarakat, sebagai penghubung antara kepentingan – kepentingan kelompok tertentu dengan pemerintah. Hal ini membuat kelompok kepentingan berada diposisi yang strategis sebagai penghubung, penghimpun, sekaligus perumus aspirasi.

Meskipun, adanya sebagian besar kelompok kepentingan yang mengklaim berjuang untuk rakyat Indonesia, namun kenyataannya apa yang mereka ucapkan dan tujukan terdapat kepentingan untuk kelompoknya sendiri. Oleh karena itu, massa yang terdiri dari rakyat kelas bawah tak mungkin secara langsung mengatur diri dengan terbatasnya sumber daya. Banyak yang berpikir kelompok kepentingan dapat berfungsi sebagai tempat untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi, akan tetapi lebih ke merupakan kaki tangan atau boneka

kelompok kepentingan atau anak cabang dari kelompok kepentingan yang mengatasnamakan rakyat Indonesia untuk terus mendominasi. Setiap individu pada kenyatannya berpotensi untuk mengorganisir diri serta memiliki akses yang sama ke dalam pemerintahan. Penyelenggaraan kekuasaan akan mengalami distorsi oleh kepentingankepentingan tertentu, jika tanpa ada keseimbangan dinamis dari unsur-unsur dalam masyarakat. Adanya kelompok kepentingan merupakan sesuatu yang baik dalam sistem politik (Hays 2011:117 - 118) Munculnya kelompok kepentingan secara cepat terjadi seiring karena adanya perluasan peran pemerintah ke segala bidang kehidupan. Dalam menyampaikanya kepada pemerintah, kelompok kepentingan akan menampuh dua jalur : Pertama, menyampaikan isu – isu yang sudah diartikulasikan untuk dibeli parpol – parpol. Kedua, kelompok kepentingan langsung menyampaikan aspirasi yang sudah diolah dan disatupadukan dengan benar kepada pemerintah, dengan cara yang dilakukan adalah melalu jalan lobbying, kampanye di media massa, serta grass-roots pressure. Hadirnya kelompok kepentingan justru akan memperkuat kekuatan setiap kelompok untuk saling mengimbangi. Dalam perspektif ini, kehadiran politik kelompok dipandang positif, dan diperlukan sebagai alternatif, dari model demokrasi pemilihan yang bersifat konvensional, yang dimonopoli partai-partai politik.

Aspirasi-aspirasi konstituen seringkali terlempar begitu pemilihan umum usai, dikalahkan oleh agenda lain yang lebih menarik. Pemilihan umum dan partai saja tidak menjamin keseimbangan negara-negara demokratis. Adanya kelompok aktif berbagai jenis dan ukuran, sangat penting agar bisa mempertahankan proses demokrasi dan agar para warga negara dapat memajukan tujuan-tujuan mereka. Kaum pluralis memandang bahwa, kekuasan politik sepatutnya tidaklah melulu di tangan elektorat ataupun kelompok elit tetapi disebar ke segenap masyarakat. Selain itu, perspektif pluralis meyakini bahwa kelompok kepentingan merupakan representasi sejati demokrasi. Karena di situlah orang dengan bebas berorganisasi, berkomunikasi, dan menggalang kekuatan sendiri secara teratur. Sementara aktifitas pemilu terkadang tidak cukup bagi masyarakat untuk mengkomunikasikan dan menyampaikan pesannya secara utuh dalam masa yang cukup. Adanya kepentingan kompetitif yang berbedabeda adalah landasan bagi keseimbangan demokrasi serta perkembangan positif bagi kebijakan publik (Hays 2011:121).

3. Kedudukan Kelompok Kepentingan dalam Sistem Politik Perspektif Kelompok Elite.

Perspektif elitis berargumen bahwa, aktifitas kelompok kepentingan membutuhkan sumberdaya material dan finansial yang tidak sedikit. Sekecil

apapun, suatu kelompok kepentingan pasti memerlukan basis finansial yang kuat, agar dapat bertahan. Sumberdaya finansial itu secara alami hanyalah dimiliki oleh sekelompok kecil anggota atau pengurusnya. Mereka tidak mungkin memberikannya secara gratis tanpa tendensi apapun. Karena itu, lahirnya kelompok kepentingan dalam banyak aspek lebih mewakili kepentingan segelintir orang itu, terutama pengurusnya ataupun anggota-anggota utamanya yang sanggup membayar iuran. Lagi pula kesadaran untuk berhimpun atau aktif dalam satu organisasi dalam taraf tertentu hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang memiliki komitmen sadar dan punya uang serta waktu luang (Loomis 2011:184). Sementara bagi kebanyakan orang miskin tidak mungkin mereka membentuk kelompok kepentingan yang kuat, mengingat sumberdayanya yang terbatas.

Lahirnya kelompok-kelompok kepentingan privat, ataupun assosiasional dalam istilah Almond dan Powell, menjadi petunjuk kuat bahwa orang-orang yang punya uang ini sajalah yang bisa menyampaikan aspirasinya ke pemerintah melalui pembentukan-pembentukan kelompok. Bagi kaum elitis, kelompok kepentingan lebih mencerminkan bias kepentingan kelompok, khususnya golongan atas, serta merupakan cacat bagi demokrasi. Dalam pandangan perspektif ini, organisasi dan institusi dapat menjalani "hidup mereka sendiri" yang dapat membuat mereka menyimpang,seperti diramalkan Weber,dari keinginan dan kepentingan anggota mereka. Ada kecenderungan oligarki, di mana struktur birokrasi dapat mengeras dan para pemimpin menjadi elite-elite yang tidak tanggap pada sektor swasta atau negeri. Akibatnya, kebijakan publik bisa condong ke arah kelompok kepentingan tertentu yang memiliki organisasi terbaik dan sumberdaya terbanyak, bisa condong ke arah agensi-agensi negara yang secara politik kuat, dan bisa dibelokkan oleh persaingan yang sengit antar sektor-sektor berbeda dari pemerintahan itu sendiri (Hays 2011:122) E. Peranan Kelompok Kepentingan dalam Sistem Politik Seluk – beluk perjalanan politik dalam sebuah Negara merupakan suatu sistem politik. Adanya demokrasi di Indonesia sebagai sistem politik di sana, di mana kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Dalam pembuatan kebijakannya pun adalah sebuah proses dalam sistem politik yang melibatkan beberapa kelompok yang mempunyai kepentingannya masing – masing dan akhirnya tersebut adalah sebuah komoditas khusus personal yang dibuat oleh para kelompok kepentingan dan pemangku kebijakan. Secara umum ciri yang dimiliki sistem politik adalah adanya fungsi-fungsi politik. Fungsi-fungsi politik dalam sistem politik dibagi dalam dua bagian, yakni: fungsi input berupa: artikulasi kepentingan, sosialisasi politik dan rekrutmen politik; fungsi output yaitu pembuatan, penerapan,

penghakiman kebijakan. Struktur politik diartikan suatu interaksi yang dianggap sah, tujuannya mempertahankan dan memelihara tata masyarakat (Mohtar Mas‟oed, 2006:13). Sistem politik dilaksanakan melalui struktur politik / lembaga politik. Lembaga politik dibedakan antara supra-struktur dan infra-struktur politik. Suprastruktur politik merupakan lembaga politik yang berfungsi menjalankan mesin politik secara formal / lembaga-lembaga resmi pemerintahan negara. Peranan kelompok kepentingan seringkali dapat dimanfaatkan sebagai tempat bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi – aspirasinya, hal ini secara tidak langsung kelompok kepentingan dapat turut berpartisipasi dalam sistem politik di Indonesia sebagai pendukung pembangunan nasional dan merealisasikan tujuan negara.

Dengan diterapkannya sistem politik demokrasi di Indonesia membuat kelompok kepentingan mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Pada masa orde baru, tempat untuk menyampaikan aspirasi kelompok kepentingan dibatasi, sehingga pada masa itu mereka dapat dikatakan sebagai alat politik bagi para penguasa. Sedangkan, pada masa ini pemerintah seringkali melibatkan kelompok kepentingan untuk berperan dalam menjalankan sistem politik yang ada di Indonesia. Salah satu elemen terpenting yang ada di sistem politik adalah kelompok kepentingan. Sehingga, adanya ruang bagi kelompok kepentingan untuk dapat ikut serta dalam merealisasikan kebijakan pemerintah yang dapat menerima aspirasi dan bermutu tinggi serta yang terpenting dan yang terutama adalah berpihak kepada masyarakat. Kemudian, kebijakan itu diterapkan menjadi peraturan perundang – undangan yang mengikat bagi masyarakat. Kelompok kepentingan lebih berperan untuk menitikberatkan focus pada upaya melafalkan kepentingan tertentu yang diinginkan pemerintah.

Mengharapkan pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan kelompoknya, karena para anggotanya berlatarbelakang dari golongan masyarakat yang merasa terasingkan oleh kebijakan pemerintah. Kelompok ini juga mengharapakan adanya desentralisasi dari partisipasi dalam eskalasi pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, jaminan mengenai partisipasi khususnya partisipasi masyarakat (termasuk ormas) dalam penyusunan peraturan perundang-undangan salah satunya tercermin pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di mana dalam UU tersebut diamanatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis yang dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, loka karya dan/atau diskusi. Sejalan dengan hal tersebut, pada tingkat daerah juga terbuka ruang bagi masyarakat termasuk

ormas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (UU Pemda).

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi dan peranan yang penting, antara lain sebagai sarana dalam mengaspirasikan kebutuhannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif. Partisipasi yang dapat dilakukan pada tingkat daerah sebagaimana dimaksud mencakup (Pasal 354 ayat (3) UU Pemda): – penyusunan Perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat; – perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah; – pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah; dan – penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi tersebut dilakukan dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan/atau keterlibatan lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan amanat dari Pasal 354 ayat (7) UU Pemda.

Efektifitas suatu sistem politik pada kenyataannya dapat diukur sejauh mana kemampuannya dalam menanggapi tuntutan-tuntutan maupun dukungan yang diterimanya serta merumuskannya dalam bentuk kebijakan atau pun output yang tepat. hasil dari setiap kebijakan merupakan bagian dari proses politik yang mencerminkan beragamnya aspirasi yang muncul yang merupakan konsekuensi dari beragamnya kepentingan masyarakat. meskipun demikian, dalam sistem politik, jadi tidak semua aspirasi yang akan muncul dapat disalurkan melalui kekuatan-kekuatan politik formal seperti partai politik yang memiliki fungsi resmi sebagai penyalur aspirasi, tetapi juga kekuatan lain yakni kelompok kepentingan.dalam tahap tertentu, keterbatasan partai politik, baik karena sumber daya material, sumber daya manusia, orientasi ideologi, kultur, faksionalisme, kepentingan jangka pendek, minat terhadap isu, keterbatasan jaringan, masalah komunikasi, hubungan personil, dan lain-lain menyebabkan mereka terkadang tidak cukup dapat diharapkan untuk menyampaikan aspirasi dalam masyarakat secara efektif. keadaaan ini menyebabkan orang lebih menumpukan perhatiannya dalam menyampaikan aspirasi melalui unsur kelompok kepentingan.

Dengan hadirnya kelompok kepentingan diharapkan sebagai pendengar sekaligus pengkritik, karena pada sistem politik di Indonesia ini terdapat

persaingan secara bebas untuk memenuhi kepentingan – kepentingannya sendiri atau dengan kelompoknya dan dapat juga saling memengaruhi kelompok satu dengan kelompok lainnya. Adanya kelompok kepentingan juga sangat penting untuk dapat mempertahankan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Representasi demokrasi merupakan bentuk kelompok kepentingan di mana masyarakat dengan bebas berbincang, berdiskusi, dan menyatukan kekuatan sendiri tanpa suatu paksaan. Dengan adanya kepentingan yang berbeda – beda juga membuat keseimbangan bagi demokrasi, hal ini membuat berkembangnya sistem politik yang ada di Indonesia.

Perspektif elitis berargumen bahwa, aktifitas kelompok kepentingan membutuhkan sumberdaya material dan finansial yang tidak sedikit. Sekecil apapun, suatu kelompok kepentingan pasti memerlukan basis finansial yang kuat, agar dapat bertahan. Sumberdaya finansial itu secara alami hanyalah dimiliki oleh sekelompok kecil anggota atau pengurusnya. Mereka tidak mungkin memberikannya secara gratis tanpa tendensi apapun. Karena itu, lahirnya kelompok kepentingan dalam banyak aspek lebih mewakili kepentingan segelintir orang itu, terutama pengurusnya ataupun anggota-anggota utamanya yang sanggup membayar iuran. Lagi pula kesadaran untuk berhimpun atau aktif dalam satu organisasi dalam taraf tertentu hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang memiliki komitmen sadar dan punya uang serta waktu luang (Loomis 2011:184).

Sistem politik yang sudah ada ini sebenarnya lebih dari cukup untuk mengakomodasi ruang gerak bagi kelompok kepentingan dan dalam pembuatan atau penyusunan kebijakan pemerintah. Akan tetapi, yang terpenting adalah bagaimana cara penerapannya, seperti dalam kemudahan jalan bagi kelompok kepentingan. Peran kelompok kepentingan pada akhirnya diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi melalui keikutsertaan kelompok kepentingan dalam pembuatan suatu kebijakan pemerintah untuk ikut dalam memecahkan permasalahan yang ada di negeri ini serta merealisasikan slogan Indonesia maju. Dalam buku Miriam Budiahrjo, partisipasi politik ini adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kegiatan ini mencakup kegiaan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat mum, menjadi anggota atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat oemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Dikemukakan bahwa mengkategorikan kegiatan – kegiatan partisipasi politik, ia mengemukakan semacam rambu – rambu, yakni : 1. Kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan sikap dan orientasi individu 2. Kegiatannya diarahkan untuk memengaruhi pemerintah 3. Kegiatan yang berhasil ataupun gagal dalam memengaruhi pemerintah 4. Kegiatan dalam memengarhi pemerintah langsung atau tidak langsung 5. Kegiatan memengaruhi pemerinth dilakukan melalui prosedur yang wajar, maupun dengan cara – cara di luar prosedur yang ada Beberapa individu dan lapisan masyarakat mempunyai kepentingan yang harus meraih dan dipertahankan untuk kelangsungan hidupnya, baik dalam kelompok msyarakat ataupun suatu bagian struktur keluarga. Dalam rangka mempertahankan dan meraih kepentingan tentu memerlukan sebuah kerja keras dan melalui usaha serta perjuangan yang saling bersentuhan dengan kelompok masyarakat dan individu. Untuk semua itu memerlukan suatu dukungan yang kuat dar segala pihak agar dapat memperoleh respon yang baik dari kalangan masyarakat atau pihak tertentu. Ragam kekuatam memiliki daya dukung kekuatan yang di dalamnya terdapat dua atau lebih orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan Bersama. Ragam kekuatan ini disebut juga dengan organisasi.

Organisasi berdiri mengatasnamakan dirinya selaku organisasi yang mengorientasi pada kepentingan, seperti Lembaga swadaya masyarakat maupun NGO, serta organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Hal ini di latar belakangi lahirnya suatu kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang di dominasi indvidu dan masyarakat. Sehingga dapat membahayakan kelangsungan hidup pada semua aspek kehiduapan bermasyarakat. Dalam perwujudannya peran dan pengaruh dari politik kelompok berasal sepenuhnya dari factor-faktor yang spesifik pada masing-masing system politik. Menurut Heywood, A. (2013) ada tiga model politik kelompok kepentingan yang paling berpengaruh, yaitu: (1) Pluralisme; (2) Korporatisme; (3) Kanan Baru. Model Pluralis, model ini memberikan gambaran paling positif tentang politik kelompok. Mereka menekankan kemampuan dari kelompok- kelompok untuk membela individu dari pengaruh pemerintah dan mempromosikan kepekaan demokratis. Tema inti dari pluralisme adalah bahwa kekuasaan politik terbagi-bagi dan tersebar secara luas. Model Korporatis, model ini berbeda dari pluralisme dimana mereka berusaha untuk menelusuri implikasiimplikasi dari hubungan-hubungan yang lebih erat yang telah berkembang di masyarakat-masyarakat industri antara kelompok-kelompok dan negara.

Korporatisme adalah sebuah teori sosial yang menekankan posisi istimewa yang dimiliki kelompok-kelompok tertentu dalam hubungannya dengan 6

pemerintah, yang memampukan mereka untuk memengaruhi rumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Model Kanan Baru, model ini menunjukkan antipati terhadap kelompokkelompok kepentingan berasal, secara ideologis, dari individualis yang terletak di jantung dari ekonomi neoliberal. Kelompok sosial dan badan-badan kolektif dari segala jenisnya karena itu dipandang dengan penuh kecurigaan (Heywood 2013).

D. Dinamika Kelompok

Dinamika merupakan suatu pola atau proses pertumbuhan, perubahan atau perkembangan dari suatu bidang tertentu, atau suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur yang satu dengan yang lain, karena adanya pertalian yang langsung diantara unsur-unsur tersebut. Pengertian dinamika ini lebih menekankan pada gerakan yang timbul dari dalam dirinya sendiri, artinya sumber geraknya berasal dari dalam kelompok itu sendiri, bukan dari luar kelompok, diilhami oleh teori kekuatan medan yang terjadi di dalam sebuah kelompok, akibat dari proses interaksi antar anggota kelompok. Dinamika Kelompok adalah suatu metoda dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai-nilai kerjasama kelompok. Artinya metoda dan proses dinamika kelompok ini berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok, yang semula terdiri dari kumpulan individu-individu yang belum saling mengenal satu sama lain, menjadi satu kesatuan kelompok dengan satu tujuan, satu norma dan satu cara pencapaian berusaha yang disepakati bersama. Berdasarkan pada Force-Field Theory, pada tahap implementasi Lewin ada tiga tahap pembaharuan perilaku kelompok, yaitu: 1) tahap unfreezing; 2) moving, dan 3) refreezing. Pada tahap pertama, merupakan tahap menyiapkan perilaku yang dititikberatkan pada upaya meminimalkan kekuatan perlawanan dari setiap anggota kelompok. Pada tahap kedua, merupakan tahap pergerakan, dengan mengubah orang, individu maupun kelompok, tugas-tugas, struktur organisasi, dan teknologi. Pada tahap terahir, merupakan tahap penstabilan perilaku dengan upaya penguatan dampak dari perubahan, evaluasi hasil perubahan dan modifikasi-modifikasi yang bersifat konstruktif. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilaksanakan ialah adanya regulasi proses feed-back melalui optimalisasi Team Building. Tim building adalah suatu metoda yang dirancang untuk membantu kelompok-kelompok untuk dapat berperilaku secara lebih efektif dengan mengevaluasi dan meningkatkan struktur, proses, kepemimpinan, komunikasi, resolusi konflik dan kepuasan para anggota kelompok secara umum.

Dinamika Kelompok secara harfiyah merupakan sebuah kata majemuk, terdiri dari dinamika dan kelompok, yang menggambarkan adanya gerakan

bersama dari sekumpulan orang atau kelompok dalam melakukan aktivitas organisasi.

E. Konflik dalam Kelompok dan Respon terhadap Konflik.

Dalam suatu kelompok yang berinteraksi satu sama lain dalam mencapai tujuannya selalu mengalami perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang berlarut-larut akan menyebabkan konflik. Anggota tim perlu memahami bahwa konflik atau ketidaksepakatan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dan tidak memiliki sifat baik atau buruk (konflik bersifat netral). Konflik akan menghancurkan kemajuan kelompok jika dibiarkan tidak terkelola, tetapi juga dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang mantap jika dikelola secara efektif. Ada beberapa masalah yang biasa dihadapi dalam Dinamika Kelompok yaitu kepemimpinan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, komunikasi yang tidak efektif dan konflik karena perbedaan kepentingan dan harapan anggota kelompok.Dinamika kelompok dipengaruhi juga oleh tujuan kelompok dan pola interaksi. Ada kalanya pada suatu kelompok terjadi konflik dan berdampak terjadinya perubahan-perubahan dalam suatu kelompok, organisasi atau tim kerja. Hasil dari suatu konflik tergantung pada bagaimana mengelolanya.

Bagian 1. Advokasi

Tujuan:

1. Memahami konsep advokasi
2. Dapat menyusun perencanaan advokasi

Advokasi adalah semua kegiatan untuk mempengaruhi pihak lain, dalam hal ini khususnya yang bertujuan untuk mempertahankan atau mempertahankan suatu kebijakan, atau bahkan sistem. Jadi, advokasi merupakan sebuah proses yang dinamis yang melibatkan setidaknya dua pihak. Advokasi harus memiliki tujuan. Advokasi dapat dilakukan di berbagai tingkat pengambilan kebijakan: lintas institusi, kabupaten, provinsi, nasional bahkan internasional.

Advokasi dapat dilakukan melalui berbagai strategi, misalnya kampanye, public hearing, petisi, komunikasi-informasi-edukasi (KIE), pemasaran sosial, dan sebagainya. Advokasi dapat berlangsung dalam periode waktu yang singkat, atau jangka panjang, tergantung pada tujuan dan seberapa cepat tujuan tersebut dapat dicapai. Jika ternyata dibutuhkan jangka waktu yang lebih lama, advokasi biasanya akan terdiri dari berbagai kegiatan jangka pendek dan spesifik untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut.

Advokasi biasanya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1. Tujuan

Karena cermat tentang isu kesehatan merupakan isu yang sangat kompleks, maka kita harus dalam memilih tujuan advokasi. Pikirkan, apakah tujuan advokasi akan dapat mengatasi masalah yang ada? Apakah tujuan ini masuk akal dan dapat dicapai? Seperti biasa, pastikan bahwa tujuan tersebut SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, berorientasi pada hasil, terikat waktu).

2. Data dan penelitian

Data, hasil penelitian, dan analisis merupakan senjata utama dalam advokasi. Advokasi yang baik harus didasarkan pada bukti dan informasi. Jadi kebutuhan, data dan informasi seperti apa yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan advokasi yang kita pilih? Jika, data dan informasi itu tidak tersedia, bagaimana cara kita mendapatkannya?

3. Audiens

Advokasi harus memiliki sasaran yang jelas dan tepat. Jadi, siapa audiens yang tepat untuk isu yang kita angkat? Audiens mana yang memiliki pengaruh dan otoritas untuk menghasilkan perubahan yang kita inginkan (atau membantu kita mencapai tujuan advokasi kita)? Jadi, audiens ada yang bersifat primer/audiens kunci, ada pula yang bersifat sekunder (bukan pengambil keputusan, tetapi mungkin memiliki kemampuan yang berpengaruh untuk pengambilan keputusan).

4. Pesan

Audiens yang berbeda memiliki reaksi yang berbeda terhadap pesan tertentu. Jadi, berbeda kecocokan antara isi dan cara menyampaikan pesan kepada audiens yang-beda. Namun, pastikan bahwa pesan tersebut mengandung setidaknya apa, why, when, where, dan how. Para pengambil keputusan, misalnya, akan lebih cepat bereaksi bila melihat besarnya dari masalah.

5. Koalisi atau networking

Terkadang, advokasi tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat gerakan advokasi. Jadi, siapa pihak-pihak yang memiiki kepentingan yang sama dengan kita dan dapat diajak berkoalisi?

6. Presentasi yang persuasif

Advokasi harus persuasif. Padahal, kesempatan untuk berbicara dan berdialog dengan pembuat keputusan kunci seringkali terbatas. Jadi, jika kita memiliki satu kesempatan untuk mengambil keputusan, apa yang harus kita sampaikan? Bagaimana caranya tentang beliau?

7. Penggalangan dana

Advokasi tidak murah. Advokasi yang berkelanjutkan, membutuhkan alokasi sumber daya yang cukup besar baik dari tenaga, waktu, pikiran, dan biaya. Jadi, bagaimana cara kita mendapatkan sumberdaya yang dibutuhkan tersebut.

8. Evaluasi

Jika tujuan advokasi telah tercapai, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai strategi kunci apa yang menentukan keberhasilannya. Jika tujuan advokasi tidak tercapat, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai kelemahan kita dan mengidentifikasi apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaikinya.

Dengan memahami elemen-elemen dari advokasi, maka sebuah rencana advokasi dapat disusun. Kemampuan menyusun rencana untuk membantu penting untuk menentukan pencapaian tujuan advokasi. Berikut ini kami lampirkan sebuah buku kerja advokasi yang sangat praktis dan bermanfaat untuk menyusun rencana advokasi kita.

Bagian 2. Lobi

Tujuan:

1. Memahami praktek melobi

Materi

Pada umumnya melobi memaksudkan kegiatan yang mencoba untuk mempengaruhi pemikiran legislator atau pejabat publik lainnya untuk/atau terhadap isu tertentu.

Ini mencakup lobi yang langsung terkait dengan bagian tertentu dari undang-undang, peraturan, kebijakan, dsb, yang umumnya kita ketahui. Namun ada pula lobbying yang lebih terkait dengan 'mengatur suasana' di sekitar masalah tertentu atau debat publik. Sebagai contoh, atmosfir adalah pro-kontra rokok dan tembakau yang ditentukan oleh kekuatan lobbying industri rokok.

Kegiatan lobi dapat berlangsung dalam sejumlah bentuk yang berbeda, termasuk:

1. Pertemuan tatap muka dengan para atau pejabat publik.
2. Komunikasi dengan politik (melalui surat, memo, dll)
3. Keikutsertaan dalam kelompok pemerintah, think tank, atau kelompok penyusunan, UU, dsb
4. Membuat pengajuan formal kepada Pemerintah (misalnya membuat 'naskah akademik' dan langkah-langkah persiapan legislatif lainnya, atau mengajukan permohonan ke MK)

5. Presentasi di Konferensi dengan tujuan menyampaikan pesan tertentu
6. Menulis di surat kabar, media online, dll
7. Mempresentasikan informasi berdasarkan bukti kepada masyarakat atau pejabat publik lain.
8. Keikutsetaan dalam Kemitraan Multi-sektor (terutama dalam kaitannya dengan pengaturan standar, menyusun kerangka regulasi, dll)
9. Mensponsori penelitian dengan agenda kepentingan tertentu
10. Memberikan sumbangan keuangan atau hadiah, menyelenggarakan atau mensponsori kunjungan dan perjalanan dengan tujuan tertentu
11. Mensponsori atau melakukan gerakan akar rumput dan kampanye hubungan masyarakat
12. Dan sebagainya

Pelobi merupakan suatu profesi. Seorang pelobi adalah seseorang yang dalam proporsi yang signifikan dari waktu mereka berusaha untuk mempengaruhi arah yang diambil oleh para pembuat kebijakan.

Pelobi bisa saja merupakan:

2. Konsultan pelobi.
   Biasanya mereka dibayar untuk mewakili klien.
3. Pelobi internal.
   Secara formal, mereka ditunjuk oleh anggota organisasinya untuk melakukan lobi.
4. pelobi kelompok.
   Mereka secara formal ditunjuk oleh beberapa organisasi yang bergerak di sektor tertentu untuk melakukan melobi demi kepentingan sektor tertentu.

Apa tujuan dari melobi? Lobi dapat memenuhi salah satu dari tujuan ini:

1. Lobi untuk kepentingan pribadi. Mereka melakukan lobi untuk memajukan kepentingan organisasi mereka sendiri.
2. Lobi kepentingan publik. Mereka melakukan lobi untuk memajukan kepentingan umum.
3. Kombinasi dari lobi kepentingan pribadi dan lobi kepentingan umum. melakukan lobi untuk memajukan kepentingan organisasinya sendiri yang kebetulan pula merupakan bagian dari kepentingan umum.

Kegiatan lobi diatur dan diterapkan dengan ketat di negara-negara, misalnya Amerika Serikat. Untuk menjadi pelobi, mereka harus terdaftar secara resmi. Praktek-praktek mereka pun praktek, dan bila ada praktek-praktek yang dinilai tidak etis, mereka akan dikenai sanksi dan tindakan tertentu. kadang kata lobbying memiliki konotasi negatif. Sebagai contoh, terlampir yang kami

berikan contoh bagaimana kelompok NCD Alliance menduga bahwa praktek melobi dari industri rokok telah berhasil mempengaruhi pengambil kebijakan.

Kegiatan melobi membutuhkan keterampilan interpersonal yang sangat baik. Pelobi juga harus sangat memahami isu-isu yang diangkat, dapat mengajukan argumen dan melakukan kontra argumen, mengenal betul 'pemain' yang relevan, dan bagaimana proses politik dan kebijakan yang akan berlangsung serta jadwal-jadwalnya, sabar, tekun, keterampilan komunikasi yang sangat baik, selalu memiliki berpikir sebagai analis, secaca strategi, taktis, tetapi juga political savvy. Karena menjadi pelobi yang efektif tidak mudah, pelobi menjadi salah satu profesi yang dibayar cukup mahal untuk keahlian mereka.

Bagian 3. Ringkasan Kebijakan

Tujuan

Memahami cara mewujudkan potensi kebijakan sebagai alat mempengaruhi kebijakan

Materi

Pada modul sebelumnya, kita telah berlatih teknik membuat ringkasan kebijakan. Policy brief merupakan dokumen yang penting karena memiliki potensi yang besar untuk mempengaruhi kebijakan. Namun, untuk dapat bekerja dengan optimal, tentu saja ada beberapa prasyaratnya. Tanpa bermaksud mengulang-ulang materi yang telah diberikan terdahulu, berikut ini kami mencoba membuat ringkasannya.

Pertama, apakah policy brief kita mengangkat isu penting dan menarik bagi para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan? Apakah policy brief kita telah diletakkan pada konteks yang tepat, Kedua, apakah policy brief kita menggambarkan masalahnya dengan jelas? Apakah policy brief kita juga telah yakin dalam hal menunjukkan apa solusi dari masalah, berapa prakiraan biayanya, dan menentukan kunci sukses implementasi solusi tersebut?

Selain itu, ada elemen-elemen lain yang turut menentukan baik buruknya sebuah policy brief. Misalnya, apakah policy brief kita telah bergantung pada hal teknik yang digunakan dalam penelitian? Apakah policy brief kita juga telah mencerminkan faktor-faktor seperti kearifan lokal, ekuitas, dan penerapan dalam solusi yang ditawarkan?

Kadang-kadang, policy brief yang kita susun perlu mendapat masukan dari pihak lain untuk memperbaiki kualitasnya. Ada dua jenis masukan yang kita perlukan. Pertama, adalah peer review. Peer review adalah review yang dilakukan oleh sesama peneliti. bertujuan untuk memastikan bahwa policy brief kita telah mencapai kualitas saintifik yang baik. Jenis yang lain adalah merit

review. Merit review biasanya dilakukan oleh setidaknya seorang, seorang pengambil kebijakan, dan satu orang pemangku kepentingan lain. Tujuan dari review merit adalah untuk memastikan bahwa selain memenuhi standar kualitas ilmiah yang baik, policy brief ini mudah dipahami oleh orang awam, dan relevan dengan sistem kesehatan dan proses pengambilan kebijakan.

Policy brief juga tidak dapat berfungsi untuk mempengaruhi kebijakan apabila dokumen ini tersimpan dengan rapi di laci kita. Policy brief ini harus dibagikan kepada audiens yang ditargetkan, dan dibaca oleh mereka. Ada beberapa cara paling mudah untuk mendistribusikan sebuah policy brief. Pertama, tentu saja adalah mengirimkan policy brief ke audiens target yang dituju. Tujukan ke alamat yang spesifik (misal: Ibu A, Direktur Jenderal ....., Kementerian Kesehatan). Minta izin kepada institusi yang bersangkutan untuk membagikan poliy brief ke beberapa orang lain di bagian tersebut, atau meletakkannya di ruang tamu kantor tersebut.

Kedua, policy brief juga bisa dibagikan dalam suatu acara khusus yang terkait dengan masalah yang dibahas oleh policy brief tersebut. Misalnya, jika ada acara rapat atau seminar yang terkait dengan masalah yang dibahas. Acara ini bisa saja merupakan acara yang kita selenggarakan sendiri sebagian dari kegiatan advokasi, atau acara yang diselenggarakan oleh pihak lain atau oleh pemerintah. Dalam hal ini, tentu saja kita harus secara resmi meminta izin kepada panitia untuk membagikan policy brief kita.

Ketiga, policy brief juga dapat diunggah ke situs resmi institusi kita sehingga audiens yang lebih luas juga dapat mengunduhnya. Walau pun mereka belum tentu merupakan audiens primer dari policy brief kita, tetapi mereka bisa saja merupakan audiens secondary kita, yang kemungkinan dapat menjadi mitra dalam kegiatan advokasi. Selain itu, apabila policy brief tersedia di situs resmi institusi kita, kita dapat dengan mudah menampilkannya apabila sewaktu-waktu ada kesempatan untuk melakukan advokasi.

Keempat, policy brief dapat pula diberikan langsung secara pribadi kepada individu yang kita tuju. Cara ini terutama diperlukan jika kita tengah berada dalam proses advokasi dan kebijakan dialog yang intens. Misalnya, kita menyurati audiens yang menjadi target untuk izin bertemu, kemudian secara pribadi mengunjungi mereka. Atau menemui mereka pada saat rehat suatu acara atau di sela-sela rapat. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat sibuk dan belum tentu punya waktu untuk membaca, kita harus siap untuk menjelaskan isi policy brief tersebut kepada beliau dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan cara yang sangat dekat. Kemauan mereka untuk membaca lebih lanjut policy brief kita juga akan sangat ditentukan oleh

tampilan dan judul policy brief yang menarik minat dan secara visual juga menarik.

Jadi, policy brief adalah salah satu 'senjata' yang bisa kita pakai untuk mempengaruhi kebijakan, tetapi keberhasilannya tentu bergantung pada seberapa tajam 'senjata' tersebut dan seberapa mahir kita menggunakannya.

Bagian 4. Dialog Kebijakan

Tujuan

Memahami konsep dan pemanfaatan kebijakan dialog

Materi

Kebijakan dialog adalah dialog yang terjadi antara para pemangku kepentingan untuk mengangkat isu, berbagi sudut pandang, menemukan titik temu dan kesepakatan atau konvensi tertentu mengenai sebuah kebijakan. Jadi, dialog kebijakan semestinya berlangsung antara para pengambil kebijakan dengan kelompok kepentingan, kelompok profesi, LSM, dan sebagainya (Hardee, K., Feranil, I., Boezwinkle, J., and Clark, B., The Policy Circle: The Framework for Menganalisis Komponen Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Ibu, dan Kebijakan HIV/AIDS, Policy Working Paper Series no.11, Washington, DC: Futures Group, 2004, hlm.15).

Dialog policy merupakan sarana yang sangat penting dalam tahapan awal dari siklus kebijakan, yaitu agenda setting. Dialog kebijakan yang dilakukan antara para pemangku kepentingan dengan para pengambil kebijakan bertujuan untuk melakukan pembingkaian masalah dan mencapai kesepakatan isu tersebut, atau jika mungkin, solusinya.

Agar dapat berhasil, sebuah kebijakan dialog membutuhkan beberapa prasyarat. Pertama, para pengambil kebijakan harus menyadari pentingnya melakukan dialog dengan pihak lain dan memberi ruang dan kesempatan untuk itu. Kedua, harus ada pihak yang ahli dalam memfasilitasi dialog ini dan menjembatani berbagai kepentingan yang berbeda. Ketiga, pihak pemangku kepentingan non pemerintah harus kredibel dan mampu menyajikan informasi berbasis bukti yang akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu, seringkali kita harus mempersiapkan sebuah policy brief sebelum melakukan kebijakan dialog. Keempat, harus terjalin hubungan yang bersifat kemitraan antara pihak-pihak yang berdialog. Dan terakhir, masing-masing pihak harus memiliki keterampilan komunikasi, negosiasi, pemecahan masalah dan resolusi konflik.

Selain kemampuan dan keterampilan individu di atas, organisasi dan institusi yang terlibat dalam dialog kebijakan harus memiliki kapasitas organisasional yang handal. Misalnya, pemangku kepentingan harus memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian yang komprehensif dan melakukan

analisis yang tajam untuk mengumpulkan informasi berbasis bukti. Pihak pengambil kebijakan juga perlu memiliki kapasitas dan sumberdaya untuk melakukan kegiatan dialog kebijakan dengan berbagai pihak di berbagai kesempatan.

Kebijakan dialog dapat berlangsung dalam suasana yang resmi, misalnya sebuah rapat atau sebuah acara tertentu. Namun, dapat pula berlangsung dalam bentuk yang tidak terlalu resmi, misalnya diskusi makan siang, atau diskusi-diskusi kecil lainnya. Yang penting adalah kualitas dari dialog tersebut. Mengingat ini adalah dialog, pastikan bahwa suasana yang dibangun adalah suasana dialog, bukan debat. Kedua belah pihak harus merasa menang-menang. Jangan sampai pula pihak pengambil kebijakan atau pemangku kepentingan lain merasa 'dikuliahi'. Kedua belah pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapat. Selain itu, kuantitas sering hal itu dilakukan dari kebijakan dialog juga penting. kadang-kadang, dialog kebijakan harus dilakukan berulang-ulang sebelum sebuah gagasan bisa tertanam dengan baik,

Bersama ini kami lampirkan bacaan utama yang harus dibaca peserta untuk lebih memahami apa saja yang terlibat dalam penggunaan kebijakan untuk mempengaruhi kebijakan. Bacaan ini juga memuat contoh-contoh dari praktek dialog kebijakan.

Bagian 5. Media

Tujuan

Memahami konsep dan cara memanfaatkan media untuk advokasi.

Materi

Menulis opini atau hasil analisis kita di media massa atau pun online media merupakan salah satu cara termudah untuk melakukan advokasi melalui media. Namun, selain itu ada pula teknik advokasi yang lain yaitu menyusun sebuah media advokasi. Terdapat berbagai dan strategi melakukan komunikasi massa yang terkait dengan hal ini, misalnya pemasaran sosial, humas, siaran pers, dan lain-lain. Bagi kita yang awam, sulit untuk membedakan sifat dan penggunaan strategi komunikasi massa.

Ada beberapa elemen kunci yang perlu kita perhatikan apabila kita bermaksud menggunakan advokasi melalui media untuk isu-isu terkait kesehatan masyarakat (Wallack, L., Dorfman, L., Jernigan, D., dan Themba, M., Media Advocacy and Public Health : Power for Prevention, Newburry Park, CA: Sage Publications Inc., 1993), yaitu:

Ada masalah yang merupakan kesenjangan kebijakan

Tersedia hasil penelitian berbasis bukti

Ada tujuan kebijakan yang ingin dicapai
Identifikasi siapa target audiensnya
Mobilisasi komunitas
Pembingkaian masalah
Rencana aksi dan strategi
evaluasi

Dari elemen-elemen kunci di atas, ada beberapa hal yang mungkin baru bagi kita yaitu mobilisasi komunitas dan issue framing. Hal-hal ini akan kita bahas disini.

Mobilisasi komunitas memaksudkan dukungan dari komunitas dan sekelompok orang untuk mengangkat isu yang kita pilih. Adanya dukungan banyak kelompok dan komunitas akan membuktikan kepada pihak pengambil kebijakan bahwa isu yang kita angkat penting dan menyangkut kepentingan orang banyak. Selain itu, dukungan dari komunitas juga memiliki nilai positif karena dapat memberikan sumbangan dalam hal dana, sumber daya, akses kepada pihak-pihak tertentu, keahlian tertentu, dsb.

Issue framing merupakan cara untuk mempresentasikan sebuah isu. Sebuah isu harus disajikan secara menarik dalam waktu singkat dan sesuai dengan persepsi yang diharapkan. Untuk dapat menarik perhatian (attention grabbing), sebuah isu dapat dikemas sebagai sesuatu yang kontroversi, terobosan, atau suatu isu yang serius dan mendesak. Ini disebut framing untuk akses. Namun, sebuah isu juga harus menyajikan informasi yang akurat dan sesuai dengan persepsi yang diharapkan. Ini disebut framing for content. Caranya, dengan menerjemahkan isu-isu sosial tersebut (misal, 'dampak memicu mengakibatkan kematian prematur yang lebih banyak dari korban kecelakaan pesawat)', menyajikan konsekuensi positif atau negatif dengan angka yang mudah dijangkau dan spesifik (misalnya, sebutkan kerugian dalam bentuk rupiah), memberikan solusi yang praktis dan nyata, dan jika mendukung penggunaan gambar atau kutipan dari pihak-pihak yang terkait. Mengingat ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, seringkali dibutuhkan tenaga profesional dan ahli komunikasi massa untuk dapat menyusun dan mendisain suatu ringkasan yang baik untuk media massa. Berikut ini kami lampirkan sebuah contoh media brief .

Media brief ini bisa diberikan kepada pihak media tertentu yang menjadi target kita (pemilihannya berdasarkan langsung, misalnya, demografi dan wilayah pembaca). Atau, kita dapat menyelenggarakan acara khusus bagi para awak media dari sejumlah media yang terseleksi. Keuntungannya adalah kita dapat memiliki kesempatan untuk memaparkan isi media brief dengan

lebih jelas dan komprehensif serta membuka kesempatan untuk tanya jawab. Acara ini tentu saja membawa konsekuensi finansial dan sumberdaya yang lebih besar. Sekali lagi, untuk dapat memilih media target yang tepat, jika diperlukan konsultasi dengan ahli komunikasi massa.

F. Pengaruh Kelompok Kepentingan Dalam Menentukan Keputusan

1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan diciptakan untuk menjadi pemimpin dunia. Dalam kehidupan nyata, manusia harus senantiasa berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain dan lingkungan. Manusia perlu hidup dalam kelompok besar maupun kecil, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dengan demikian, manusia dapat berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungannya (Octaviayani, 2020).

Setiap individu dan setiap masyarakat memiliki kemaslahatan yang harus ditegakkan dan didukungun tuk dapat bertahan dalam kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, negara, maupun negara lain. Tentu saja, untuk mencapai dan mempertahan kanmanfaat tersebut membutuhkan usaha dan kekuatan serta dukungan dari semua partai politik. Dengan demikian, semua perjuangan berhubungan dengan individu atau masyarakat, dalam arti yang lebih luas: partai politik nasional dan internasional. Untuk itu, Anda perlu mendapatkan perhatian serius dari komunitas yang Anda minati dan pemangku kepentingan tertentu. Suatu bentuk daya dukungan adalah suatu kekuatan yang melibatkan dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Bentuk kekuasaan ini juga disebut organisasi (Adi, 2012).

Organisasi kepentingan yang berdiri sendiri adalahl embaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Di balik munculnya kelompok kepentingan ini adalah individu, komunitas, negara, dan individu dan komunitas yang memiliki kekuatan besaratas negara-negara lemahlainnya (terbelakang, baru, berkembang) yang membutuhkan kelangsungan hidup dalam segala hal. Negara, dan negara lain. Membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, berbangsa (Mahardika, 2012).

Berbicara masalah sosial di era demokrasi tidak akan jauh dari system politik. Efektifitas suatu sistem politik pada kenyataannya dapat diukur sejauh mana kemampuannya dalam menanggapi tuntutan-tuntutan maupun dukungan yang diterimanya serta merumuskannya dalam bentuk kebijakan atau pun output yang tepat. Hasil dari setiap kebijakan merupakan bagian dari proses politik yang mencerminkan beragamnya aspirasi yang muncul yang merupakan konsekwensi dari beragamnya kepentingan masyarakat. yakni kelompok kepentingan (interest group) (Setiadi, 2013).

Secara sederhana, kelompok merupakan suatu kumpulan individu-individu atau pun masyarakat yang memiliki kepentingan yang dapat dipertahankan dan dirah demi terciptanya kelangsungan hidup setiap warga negara, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, negara. Dalam rangka mencapai dan mempertahankan sebuah kepentingan, tentu saja memerlukan sebuah usaha, kerjakeras, dan sebuah perjuangan yang semuanya saling bersentuhan antar individua tau masyarakat, maupun lebih besar yaitu negara dan beberapa pihak international (Clara, 2020).

Untuk itu semua, sangat diperlukan kekuatan dan motivasi maupun dukungan dari berbagai pihak sehingga di peroleh tanggapan yang baik dari masyarakat dan kelompok atau pihak pihak tertentu menjadi tujuan dari sebuah kepentingan Sebuah kelompok organisasi berpengaruh sebagai sebuah kelompok yang terorganisir dan sistematis yang mana kelompok ini senantiasa memiliki tujuan secara kolektif untuk mempengaruhi dari setiap kebijakan kebijkan yang akan dibuat atau yang sedang dijalan kandari sebuah state atau government. Seiring berjalannya waktu, kelompok dan gerakan kepentingan tumbuh dan berdampak cukup luas dalam implementasinya di tanah air. Dalam perjalanan sistem demokrasi, kelompok dangerakan pemangku kepentingan mengkatalisasi hubungan antara korban dan korban (masyarakat) (Hayyi, 2020).

Dengan demikian, kelompok kepentingan merupakan salah satu kekuatan penting dalam konfigurasi politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamisasikan sistem politik, dalam bentuk lahirnya politik kelompok-kelompok yang menegaskan adanya pluralisme dan kompetisi dalam masyarakat.

Mengoperasikan sistem demokrasi kelompok penekan dan gerakan sosial mengkatalisasi upaya dan upaya untuk mengintegrasikan perubahan dalam distribusi dan mengaturnya kedalam mengekspresikan bentuk diskusi yang bermanfaat secara sosial, atau bentuk perlawanan terhadap interaksi antara gerakan sosial dan beberapa lawannya didefinisikan sebagai sebuah gerakan sosial yang mencari perubahan abadi dalam masyarakat dan semua warga negara. (Sudarmanto, 2020)

2. Ciri-Ciri Kelompok Kepentingan

Secara generik kelompok kepentingan hampir sama menggunakan sebuah partai politik yang sama adalah sebuah katalisator penghubung primer antara pemerintah dan yang pada perintah. Kelompok kepentingan lebih pada sekelompok tiga individu yang mengadakan suatu komplotan yang didorong sang sebuah kepentingan-kepentingan yang bisa menghipnotis suatu grup tertentu. Kepentingan bisa berupa kepentingan generik, warga luas dan sekelompok kepentingan tertentu. Contoh menurut komplotan adalah grup kepentingan yaitu misalnya sebuah organisasi massa.

Sebuah kelompok tidaklah gampang diklasifisikasikan, apalagi bertujuan buat memperjuangkan suatu kepentingan menggunakan menghipnotis Lembaga-forum politik supaya bisa mempermudah juga mempermulus langkah mereka pada tetapkan keputusan yangn menguntungkan. Hal tadi bisa dihindari dalam sebuah grup yang akan merasa dirugikan menurut keputusan tadi. Kelompok kepentingan sedang berusaha menerima wakil-wakilnya pada dewan permusyawaratan rakyat, melainkan mereka menghipnotis satu atau beberapa partai politk yang didalamnya berwenang mendukung setiap kegiatan & langkah strategis mereka kedepannya. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan sebuahpertarungan baru yang akan ada waktu terdapat suatu kelompok yang merasa pada ktirikan sebagai akibatnya perlu sebuah kajian yang menadalam akan hal tadi (Mahyuddin, 2021).

Kelompok kepentingan (interest group) seringkali di defenisikan sebagai, a group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests (Benditt 1975:34). Berdasarkan definisi tersebutfungsi kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan (Janda, Berry, & Goldman 1997). Dengan kata lain, tujuan mereka hanyalah berusaha untuk "mempengaruhi" proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya. Karena itu, jika dibandingkan dengan fungsi partai politik maka agak berbeda dan lebih sempit. Sepertimana didefinisikan oleh Giovanni Sartori, partai politik sebagai, any political group that presents at elections, and is capable of placing through elections, candidates for public offices (1984:64). Berdasarkan definisi tersebut, partai politik sesungguhnya secara sengaja bertujuan untuk mendudukkan wakil-wakilnya dalam pemerintahan, atau meraih jabatan-jabatan dalam pemerintahan (Alynudin, 2016).

Meskipun mereka bertujuan mewakili kepentingan-kepentingan anggotanya, dalam artian kepentingan publik yang terbatas, tetapi adakalanya di antara anggota-anggota kelompok kepentingan juga memiliki ambisi-ambisi yang bersifat pribadi. Bahkan ada di antaranya yang secara pribadi berhasil masuk dalam pemerintahan dan bukan atas nama kelompok kepentingannya

Kelompok kepentingan pada hakikatnya dapat dibagi menjadi dua, yakni: Pertama,kelompok kepentingan privat; dan kedua,kelompok kepentingan publik. Kelompok kepentingan privat adalah kelompok kepentingan yang berusaha memperjuangkan kepentingan-kepentingan anggota-anggota yang diwakilinya (golongan tertentu) dalam konteks kehidupan umum seperti: Pengacara, dokter, akuntan, dosen, guru, hakim, pengacara, serta golongan professional lain,

termasuk juga para pekerja atau buruh. Juga dalam kontek sini adalah kepentingan produsen atas bidang-bidang usaha tertentu. Sementara kelompok kepentingan yang bersifat publik adalah kelompok kepentingan yang lebih berorientasi mempengaruhi pemerintah agar melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan kepentingan umum secara menyeluruh, ketimbang anggotanya.

Contoh dari jenis kelompok kepentingan ini adalah geraka-gerakan sosial yang mengadvokasi isu-isu lingkungan, pendidikan, pertambangan, perempuan, ketenagakerjaan, korupsi, kekerasan, perdagangan manusia, konsumen dan sebagainya, Almond dan Powell (1980) dalam karya klasiknya membagi kelompok kepentingan menjadi empat jenis, yakni: Pertama,kelompok anomik, yang merupakan kelompok kepentingan yang bersifat spontan, terbatas, muncul seketika. Kelompok kepentingan ini memiliki tingkat kemampuan komunikasi politik yang rendah, dengan ikatan keanggotaan yang longgar, dan hanya dalam rangka untuk menanggapi insiden tertentu (Alynudin, 2016).

Kelompok ini lebih merupakan terobosan kedalam sistem politik berhubungan dengan isu-isu tertentu yang boleh jadi merespon terhadap sikap frustasi tertentu, sehingga melahirkan demonstrasi dan kerusuhan. Namun demikian, setelah aspirasi mereka didengar oleh pemerintah maka kelompok ini akan bubar. Mereka seperti: Ikatan Warga Kampung Pulo yang tergusur; Warga penghuni Kalijodo; Persatuan pedagang rotan di Rawasari, dan sejenisnya. Kedua, kelompok non assosiasional, yang merupakan kelompok kepentingan yang diorganisasikan secara informal, dengan keanggotaan yang longgar dan aktifitasnya bergantung pada isu-isus pesifik. Jaringan kelompok ini terbatas, tetapi lebih baik ketimbang kelompok pertama di atas.

Kelompok non assosiasional berbeda dengan kelompok anomik dalam hal keanggotaannya, yang biasanya bersifat sama latar belakang atau identitasnya. Kelompok ini mencakup kelompok keturunan, etnik, regional, agama, status, kelas sosial. Contoh kelompok ini adalah: Trah Keluarga Mangkunegaran; Ikatan Warga Yogyakarta di Jakarta, IkatanWarga Dayak Se-Kalimantan, Ikatan Saudagar Bugis, Alumni ITB, Alumni Pendidikan Lemhannas, Alumni Pondok Pesantren Gontor, kelompok-kelompok arisan keluarga, kantor, kampung, dan lain-lain. Ketiga, kelompok institusional yang merupakan kelompok kepentingan yang melembaga secara formal, dengan kegiatan rutin, sertajaringan organisasi yang kuat dan keanggotaan yang bersifat resmi. Kelompok ini memiliki fungsisosial dan politik yang luas, mencakup hampir sebagian besar segi kehidupan (ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, seni, hukum, keluarga, lingkungan, dan lain-lain), di samping tujuan-tujuan khusus yang mereka miliki. Contohnya ialah:

Organisasi Nahdlatul Ulama (NU); Muhammadiyah; Persatuan Islam (Persis); Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, dan lain-lain (Pramono, 2015).

Sedangkan, menurut (Heywood 2013) kelompok dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam:

a. kelompok komunal, yang lebih menenkankan pada kelompok kepentingan konvensional dimana anggotanya secara sadar dan peduli untuk menjadi bagian dari structural kelompok.
b. kelompok institusional, mengarah pada bagian dari sebuah mesin pemerintahan sehingga dari mesin tersebut terdapat kelompok-kelompok kepentingan dimana mereka tidak memiliki otonomi secara mutlak.
c. kelompok asosiasional, lebih mengacu pada masyarakat yang dibentuk menajdi suatu elemen demi mencapai satu tujuan mereka, sehingga lebih megarah pada ekpresi dan esensi dari sebuah aksi yang sifatnya instrumental.

Lebih lanjut ia menjelaskan pembagian ketiga kelompok tersebut. Singkatnya, kelompok masyarakat selalu terkait dengan struktursosial dan berbagi perasaan dan perasaan berdasarkan koneksi komunitas, kesetiaan, silsilah, kerabat dan kepercayaan dalam iman. Nilai-nilai bersama adalah nilai-nilai bersama yang dengan mudah membangkitkan kesadaran orang untuk merasakan, berpikir dan bertindak bersama, berdasarkan dorongan untuk memenuhi dorongan orang lain. Saling pengertian, mengutamakan orang yang lemah dan tidak berdaya, menghargai kerukunan dan kerukunan, sertaber sikap baik juga merupakan semacam ciri khas yang menekankan bahwa nilai-nilai bersama selalu menjadi semangat yang mendukung masyarakat.

Selanjutnya, kelompok institusional lebih kepada kelompok yang terstruktur yang memiliki visi, misi dan tugas serta fungsi kepentingan yang sama. Selanjutnya, menurut (Sutrisman, 2019) ada empat tipe kelompok kepentingan yaitu sebagai berikut:

a. Institusional interest groups, merupakan bagian dari beberapa elit politik, seperti para alim ulama, anggota parlemen, tantara, dan berbagai elit politik.
b. Associational interest groups, yang digabungkan dari kelompok tertentu, seperti perhimpunan dagang dan beberapa perserikatan dagang.
c. Non-associational interest groups, yang terdiri atas kelompok etnis, suku, agama dan lain-lain.
d. Anomic interest groups yaitu kelompok bersifat tak terduga dalam beberapa kejadian, misalnya kelompok demonstrasi.

Advokat institusional mengaku lebih formal dan memiliki peran dan fungsi untuk kepentingan visi dan misinya, serta komponennya. Kelompok kepentingan

asosiatif adalah kelompok lain yang terbentuk dari suatu kelompok dan masyarakat. Kelompok kepentingan yang tidak berafiliasi cenderung diklasifikasikan sebagai masyarakat umum dari pada berpusat pada kepentingan tertentu. Partisipasi politik rawan duplikasi, dan karena keragaman tanpa nilai atau aturan yang mengaturnya, terjadi duplikasi kerusuhan dan kekerasan politik. (Shaleh, 2018).

Almond dan Powell (1980) dalam karya klasiknya membagi kelompok kepentingan menjadi empat jenis, yakni:Pertama,kelompok anomik, yang merupakan kelompok kepentingan yang bersifat spontan, terbatas, muncul seketika. Kelompok kepentingan ini memiliki tingkat kemampuan komunikasi politik yang rendah, dengan ikatan keanggotaan yang longgar, dan hanya dalam rangka untuk menanggapi insiden tertentu. Kelompok ini lebih merupakan terobosan kedalam sistem politik berhubungan dengan isu-isu tertentu yang boleh jadi merespon terhadap sikap frustasi tertentu, sehingga melahirkan demonstrasi dan kerusuhan. Namun demikian, setelah aspirasi mereka didengar oleh pemerintah maka kelompok ini akan bubar. Mereka seperti: Ikatan Warga Kampung Pulo yang tergusur; Warga penghuni Kali jodo; Persatuan pedagang rotan di Rawasari, dan sejenisnya.Kedua,kelompok non assosiasional, yang merupakank elompok kepentingan yang diorganisasikan secara informal, dengan keanggotaan yang longgar dan aktifitasnya bergantung pada isu-isu spesifik. Jaringan kelompok ini terbatas, tetapi lebih baik ketimbang kelompok pertama di atas.

Kelompok non assosiasional berbeda dengan kelompok anomik dalam hal keanggotaannya, yang biasanya bersifat sama latar belakang atau identitasnya. Kelompok ini mencakup kelompok keturunan, etnik, regional, agama, status, kelas sosial. Contoh kelompok ini adalah: Trah Keluarga Mangkunegaran; Ikatan Warga Yogyakarta di Jakarta, Ikatan Warga Dayak Se-Kalimantan, Ikatan Saudagar Bugis, Alumni ITB, Alumni Pendidikan Lemhannas, Alumni Pondok Pesantren Gontor, kelompok-kelompokarisankeluarga, kantor, kampung, dan lain-lain. Ketiga,kelompok institusional yang merupakankelompokkepentingan yang melembaga secara formal, dengan kegiatan rutin, sertajaringan organisasi yang kuat dan keanggotaan yang bersifat resmi. Kelompok ini memiliki fungsi sosial dan politik yang luas, mencakup hampir sebagian besar segi kehidupan (ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, seni, hukum, keluarga, lingkungan, dan lain-lain), di sampingtujuan-tujuan khusus yang merekamiliki. Contohnya ialah: Organisasi Nahdlatul Ulama (NU); Muhammadiyah; Persatuan Islam (Persis); Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, dan lain-lain.

Sikap Ormas dalam Dunia politik, Berkaitan dengan pendidikan dan wawasan politik bagi masyarakat, Pahit tiartik menyatakan paling tidak ada empat kecendrungan sikap ormas dalam dinamika dunia politik. Ini juga erat kaitannya dalam menentukan bagaimana model transformasi informasi, persepsi dan opini dari ormas kepada masyarakat. Pertama, pimpinan ormasakan bersikap mendukung salah satu calon kepala daerah. Pada titik ini, ormas akan mengerahkan segenap sumber daya. Mulai dari menggalang atensi masa, mempengaruhi persepi masyarakat, dan aneka negosisasi guna mensukseskan jagoannya.

Kedua, pimpinan ormas akan bersikap diam dan apatis dengan perkembangan politik di daerah. Sikap ini selanjutnya disebuta politis. Apabila ormas mengambil sikap ini, maka ketidak berpihakan pada kubu politik manapun akan menjaga independensi dari kepentingan politik jangka pendek. Kegiatan yang dilakukan sejatinya dalam rangka tujuan fundamental ormas. Disisi lain, terkadang dukungan politik dibutuhkan guna mempermudah pelaksanaan kegiatan ormas. Ketiga, ormas dapat bersikap posisi ganda. Sikap ini mengahruskan pimpinan ormas mampu mencitrakan diri sebagai ormas yang tidak menolak pasangan calon tertentu, dan tidak secara tegas mendukung. Dalam posisi ini, ormas bisa berperan guna memperoleh keuntungan dari beberapa calon yang potensial. Keempat, pimpinan ormas harus bersikap kritis dan kosntruktif. Ini berarti ormas harus bersikap kritis terhadap semua calon. Posisi ini mengharuskan ormas untuk bersikap jeli dan cermat dalam melihat jejak karir para calon. Sikap ini akan memberikan keuntungan bagi ormas sehingga bisa bermain pada level hight politic dan tidak terjebak pada kepentingan politik praktis. Pada dasarnya apapun sikap yang diambil oleh ormas harus diniatkan bagi kepentingan dan kemajuan rakyat. Terlebih lagi, jika sikap tersebut niscaya melahirkan kemandirian pemilih yang beradasarkan pada nilai-nilai kebaikan. Ormas harus dapat memberikan fatwa berupa landasan normatif dan etik untuk menyokong kearah kemandirian tersebut.

Salah satu fenomena yang menarik yang harus diperhatikan adalah peran dan sikap organisasi masyarakat (ormas) dalam menyelenggarakan pemilu. sangat menariksaatinidenganpolitisipraktis. Sebagai organisasi massa besar memang memiliki banyak anggota ormas dapat dengan mudah memenangkan kontes politik. (Biyanto, 2010).

G. Model Politik Kepentingan Kelompok

Beberapa lapisan individu dan sosial, baik dalam kelompok masyarakat maupun dalam struktur keluarga, memiliki manfaat yang harus dicapai dan

dipertahankan untuk kelangsungan hidupnya. Tentusaja, menghubungi kelompok masyarakat dan individu membutuhkan banyak usaha, usaha dan kerja keras untuk mempertahankan dan mencapai keuntungan. Semua ini membutuhkan dukungan yang kuat dari semua pihak agar mendapat respon yang baik dari masyarakat atau pihak-pihak tertentu.

Keanekaragaman kekuatan adalah daya dukung dua orang atau lebih untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kekuatan yang beragam ini disebut juga organisasi. Ke-organisasi tersebut didirikan atas nama mereka sendiri sebagai organisasi berbasis kepentingan seperti organisasi non-pemerintah, LSM dan organisasi masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan munculnya kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang dikuasai oleh individu dan masyarakat. Semoga membahayakan kelangsungan semua aspek kehidupan sosial. Peran dan pengaruh politik kelompok dalam mencapai hal ini hanya muncul dari faktor-faktor unik untuk setiap sistem politik (Amir, 2019). .

Menurut Heywood, A. (2013), kelompok pemangku kepentingan yang paling berpengaruh memiliki tiga model politik. (2) Korporatisme, (3) Hukum baru. Model multi dimensi ini memberikan citra politik kelompok yang paling positif. Mereka menekankan kemampuan kelompok untuk melindungi individu dari pengaruh nasional dan mempromosikan kerentanan demokrasi. Temasentral dari pluralisme adalah pembagian dan penyebaran kekuasaan politik. Sebagai model perusahaan, model ini berbeda dari pluralisme karena berusaha untuk menyelidiki dampak dari hubungan yang lebih erat yang telah berkembang antara kelompok dan negara dalam masyarakat industri. Korporatisme adalah teorisosial yang menekankan posisi istimewa kelompok tertentu pada pemerintah dan memungkinkan untuk mempengaruhi perumusan dan implementasi kebijakan publik. Model ini, yang menyarankan model sayapkananbaru, anti pati terhadap sekelompok pemangku kepentingan, muncul secara ideologis dari individualis dijantung ekonomi neoliberal. Oleh karena itu, kelompok sosial dan segala jenis kelompok dipandang dengan kecurigaan (Heywood 2013).

H. Strategi Politik Kelompok kepentingan

Kelompok kepentingan berusaha mengintervensi suatu kebijakan pemerintah tanpa berkehendak lain dapat memperoleh jabatan politik. Sedangkan partai politik secara terang-terangan memang bertujuan untuk memperoleh dan menguasai jabatan-jabatan publik melalui pemilu. Kalaupun kelompok kepentingan mendapatkan porsi dalam kekuasaan tidak menunjukkan bahwa kelompok kepentingan itu berorientasi kekuasaan. Gambar di bawah ini menjelaskan tentang

strategi civil society sebagai kelompok kepentingan dan gerakan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Strategi masyarakat sipil sebagai kelompok kepentingan dan gerakan dalam mempengaruhi kebijakan dengan sejumlah instrumen yaitu: advising, advocasi, lobbying dan activism. Masing masing instrumen ini memiliki karakter gerakan yang berbeda-beda. Namun, dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan pilihan-pilihan yang dikehendaki. Masing-masing instrumen dan pilihan-pilihan gerakan tersebut menjadi penentu warna hubungan masyarakat sipil sebagai kelompok kepentingan dan gerakan dengan pemerintah. Selanjutnya menurut Heywood (2013), secara garis besarada beberapa faktor utama yang menentukan pengaruh kelompok, yaitu seperti: (1) Kebudayaan Politik; (2) Struktur Kelembagaan; (3) Watak dari system partai; (4) Watak dan gaya dari kebijakan public (Widyawati, 2014).

Dalam pelaksanaannya ada beberapa aspek yang mempengaruhi suatu kelompok kepentingan dalam memberikan pengaruhnya, terutama dalam watak dan sumber dayanya, yaitu seperti: simpati publik terhadap kelompok tersebut dan tujuan-tujuannya, ukuran keanggotaannya dan basis aktivisnya, kekuatan finansial dan kemampuan organisasionalnya, kemampuan untuk mempengaruhi pemerintah, hubungan- hubungan personal atau institusional yang mungkin dimilikinnya dengan partai-partai politik atau badan-badan pemerintahan. Metoda-metode yang digunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan dipengaruhi oleh saluran-saluran akses yang digunakan untuk memberikan pengaruh. Saluran-saluran akses tersebut adalah seperti: (1) Birokrasi; (2) Majelis; (3) Pengadilan-Pengadilan; (4) Partai-Partai Politik; (5) Media Massa; (6) Organisasi-Organisasi Internasional (Heywood, 2013).

I. Peran dan Fungsi Kelompok Kepentingan

Meskipun tidak terlibat langsung dalam pemilu atau diorganisir sebagai partai politik, kelompok pemangku kepentingan disebut sebagai "kerajaan anonim" karena mereka menggunakan kekuatan politik yang cukup untuk mempengaruhi berfungsinya sistem politik negara.Sering disebut. Dampak dari beberapa kelompok pemangku kepentingan dapat mengubah jalannya pemilihan yang mendukung satu kandidat dan / atau bertentangan dengan yang lain, dan kandidat mengusulkan dan mendukung.Gunakan dukungan dari kelompok yang berbeda, tergantung pada platform Anda. Kelompok pemangku kepentingan merupakan elemen penting dalam berfungsinya demokrasi pluralistik yang sehat. Peran mereka dalam memusatkan keuntungan pada kekuatan politik yang sebenarnya menggeser peran partai "umum" dalam mewakili kepentingan yang beragam dan lebih

konkret. Kelompok penekan juga mempromosikan demokrasi yang sehat dengan menyediakan sarana alternatif untuk berpartisipasi dalam politik dan memberikan pendidikan sipil alternatif, bukan melalui partai politik atau media.

Namun, karena banyak kelompok pemangku kepentingan yang berbasis negara, persaingan antar kelompok tidak dapat dihindari, dan konflik antara kelompok yang berbeda dan taruhan yang dipromosikan oleh masing-masing kelompok terutama politik oleh kelompok pemangku kepentingan. melemahkan demokrasi dalam politik negara berkembang di mana manipulasi dilakukan. Kelompok minoritas yang terlalu politis dapat mendominasi sistem politik di mana mayoritas masyarakat tidak mendukung mereka atau kepentingan mereka. Posisi pemimpin biasanya tidak dipilih melalui pemungutan suara, sehingga kepentingan yang diwakili oleh kelompok mungkin tidak secara akurat mencerminkan keinginan para anggotanya. Oleh karena itu, pendapat ketua kelompok tidak selalu sesuai dengan pendapat anggota.(Azra, 2019).

Berikut peran dan fungsi kelompok kepentingan secara garis besar:

1. Media yang bermanfaat bagi masyarakat

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat bermanfaat atau merugikan masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, tetapi dapat diabaikan dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, publik tertarik dan perlu memperhatikan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah.

2. Perjelas minat Anda

Kelompok kepentingan fokus pada klarifikasi kepentingan khusus yang diarahkan pada pemerintah. Mereka ingin pemerintah merumuskan kebijakan yang berpihak pada kelompok mereka. Kelompok pemangku kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan mereka dengan mempengaruhi institusi politik untuk mencapai keputusan yang menguntungkan dan menghindari keputusan negatif.

3. Sebagai salah satu jalur masuk pemerintah

Kelompok pemangku kepentingan memberikan informasi yang digunakan pemerintah untuk menentukan kebijakan yang harus mereka ambil untuk rakyatnya. Input yang mereka berikan bertujuan agar para pengambil keputusan memahami pandangan mereka dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam tulisannya, Gabriel A. Almonds, demonstrasi, dan (mungkin) kekerasan yang ditujukan untuk memberi informasi kepada pembuat kebijakan adalah saluran yang paling penting dan sering digunakan. Ukuran ini sering digunakan untuk meringkas tuntutan pembuat kebijakan (Heywood, 2013).

J. Partai Politik

Partai politik adalah organisasi politik yang mengikuti cita-cita tertentu atau didirikan untuk tujuan tertentu. Definisi lain adalah kelompok yang terorganisir di mana anggotanya memiliki arah, nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan menduduki status politik. Kebijakan biasanya dilaksanakan dengan menggunakan cara-cara konstitusional.

Partai politik bercirikan mandiri secara ekonomi, memiliki landasan atau arah politik sendiri, mengedepankan kepentingan kelompok dalam masalah politik, dan berkontribusi sebagai suprastruktur politik bagi pembangunan politik. negara.Berikut beberapa definisi partai politik oleh para ahli :

Menurut R.H Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk mengendalikan dan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijakan umum mereka.

Menurut Carl J. Frederich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.

Menurut Sigmund Neumann dalam bukunya Modern Political Parties, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Menurut Mark N. Hagopian, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung tau partisipasi rakyat dalam pemilihan.

BAB III PENUTUP

A. Simpulan

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain. Saling mempengaruhi artinya pengaruh dan pertalian kebathinan yang terjadi dengan sendirinya yang menjadi unsur yang harus ada bagi masyarakat. Masyarakat bukan berarti penjumlahan orang-orang saja, tetapi diantara mereka harus ada pertalian satu sama lainnya yang merupakan kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses dan menyebabkan perubahan dapat terjadi dalam kehidupan manusia. Kedudukan kelompok kepentingan dalam system politik adalah terletak di antara pemerintah dengan masyarakat. Posisinya berada di tengah sebagai jembatan yang menghubungkan antara kepentingankepentingan masyarakat dan pemerintah.

Kelompok kepentingan terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan. Dengan kata lain tujuan mereka hanyalah untuk “mempengaruhi” proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya.

B. Saran

Demikian berakhirnya buku ini semoga dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca sekalian. Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam buku ini. Oleh karena itu, tidak bosan-bosan kami meminta kritik & saran yang bersifat membangun kepada pembaca dan teman-teman sekalian. Terima Kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, R. (2012). Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Alynudin, S. (2016). TAX POLICY IN THE STATE BUDGET: COMPLEXITY OF INTEREST STATE, ENTREPRENEURS AND COMMUNITY JUSTICE. JURNAL ILMIAH NIAGARA, 8(1), 86-93.

Amir, M. T. (2019). Perilaku organisasi. Prenada Media.

Ayatullah Syahid Murtadha Muthahhari, *Manusia dan Alam Semesta*

Azra, A., &Abdillah, M. 2019 Kebijakan politik luar negeri indonesia (studi diplomasi pemerintahan era reformasi 1998-2018 dalam upaya penyelesaian konflik israel-palestina).

Biyanto, B. (2010). Kiprah ormas dalam pilkada.

Clara, E., &Wardani, A. A. D. (2020). Sosiologi Keluarga. UNJ PRESS.

Hayyi, A., Hidayatullah, H., & Amil, A. (2020). Kekuatan Politik Ormas (Amphibi) Untuk Memenangkan Pasangan Calon Ahyar-Mori Pada Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah. Journal of Government and Politics (JGOP), 2(1), 39-56.

Heru Juabdin Sada, *MANUSIA DALAM PERSPSEKTIF AGAMA ISLAM* Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 7, Mei 2016

Heywood, A. (2013). The Palgrave Macmillan POLITICS. New York: Palgrave Macmillan.

Jatmiko, W. (2010). Fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik untuk menyikapi golongan putih (absentia voter) di tempat pemungutan suara xii sondakan pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 (studi pada dewan pengurus daerah partai keadilan sejahtera kota.

Mahardika, F., & KEBUDAYAAN, K. (2012). Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

Mahyuddin, M., Kurniullah, A. Z., Hasibuan, A., Rahayu, P. P., Purba, B., Sipayung, P. D. &B tarbutar, M. (2021). Teori Organisasi. Yayasan Kita Menulis.

Pramono, G. E. (2015). Transformasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Kelompok Kekerasan (Studi kekerasan Ormas di Jakarta). Jurnal keamanan nasional, 1(2), 251-278.

Saihu, *KONSEP MANUSIA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERUMUSAN TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT MURTADHA MUTHAHHARI,* JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL 1, NO. 2 TAHUN 2019

Setiadi, E. M., &Kolip, U. (2013). Pengantar sosiologi politik. Kencana.

Shaleh, M., &Firman, S. P. (2018). Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai. Penerbit Aksara Timur.

Sudarmanto, E., Mawati, A. T., Nugraha, N. A., Purba, P. B., Komariyah, I., Purba, S., ... &Dewi, I. K. (2020). Manajemen Sektor Publik. Yayasan Kita Menulis.

Sutrisman, D. (2019). Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa. Guepedia.

Widyawati, N. (2014). Etnisitas dan agama sebagai isu politik: kampanye JK-Wiranto pada Pemilu 2009. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

BIOGRAFI PENULIS

Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si. Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Doktorandus {Drs}. Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan Maret tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen magang di almamaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya "Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan" dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu, : Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi Jurnalistik,Hubungan Masyarakat, Bimbingan Konseling Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar, workshop, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah dari kolaborasi terhadap penugasan pada mahasiswa Komunikasi penyiaran Islam semester enam dan mahasiswa jurnalistik semester empat tahun 2022 bekerjasama dengan dosen pengampu Mata Kuliah Sistem politik Indonesia Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tentu saja, amat di sayangkan bila hasil dari penelitian mahasiswanya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia itu ditambah kebaikan dari fihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu : Komunikasi Politik : Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 di terbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu : Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang Banyumas. Buku ke 3, yaitu Komunikasi Kebijakan Pendidikan di terbitkan oleh Jakad Media Surabaya pada tahun 2021. Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdi selama ini. Ada juga tulisannya yang telah terbit di jurnal internasional. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada akun Google Cendikia : Cecep Suryana. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di posting pada akun face book dengan alamat cecep suryana majalengka dan akun instagram dengan alamat csuryana56.

Fahminah, Wanita Kelahiran Garut, 19 January 2001. Merupakan Mahasiswa semester enam yang sedang menempuh pendidikan formal jenjang S-1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung , Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam (KPI), Fakultas Dakwah dan Komunikasi . Ia adalah Mahasiswa yang senang mengasah kreativitasnya dengan mencoba banyak hal dengan mengikuti berbagai organisasi di kampus . Tak hanya itu , Fahminah juga sudah menyelesaikan kegiatan PPM (Praktik profesi Mahasiswa) di perusahaan TVRI Jabar dan kegiatan Magangnya di Radio Keluarga Ranca

.

Fajri, Pria Kelahiran Bandung, 25 November 2001. Merupakan Mahasiswa semester enam yang sedang menempuh pendidikan formal jenjang S-1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung , Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam (KPI), Fakultas Dakwah dan Komunikasi . Ia adalah Mahasiswa yang senang mengasah skill dan keterampilan dengan mengikuti komunitas perfilman di kampus . Tak hanya itu , Fajri juga sedang mewakili Kampusnya pada lomba film pendek.

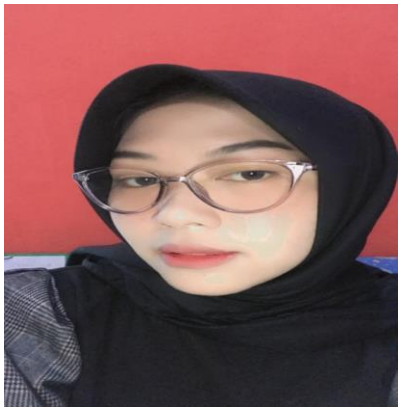

Indry Febrian, tempat tanggal lahir Karawang 11 Febuari 2002, anak ketiga dari lima bersaudara. Seorang mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu penulis juga aktif didunia pergerakan dan organisasi. Dengan ketentuan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menulis karya pertama nya dalam menulis buku di tingkat perguruan tinggi. Semoga dengan penulisan ini mampu berkontribusi dalam dunia pendidikan.

Ikhsan Insanul Hakim, tempat tanggal lahir purwakarta 15 september 1999. Ia adalah anak kelima dari 5 bersaudara juga merupakan seorang mahasiswa semester 6 jurusan Komunikasi Penyiaran islam di Universitas islam negeri bandung. Selain seorang mahasiswa ia aktif di organisasi kepemudaan seperti purna paskibra, pokjayan genre kabupaten purwakarta. Selain sebagai seorang mahasiswa dan aktif di organisasi, ia juga sedang bekerja di pemda kabupaten purwakarta sebgai protokol bupati.Berbekal tekad dan keinginan untuk berkembang, ia juga aktif di tempat tinggalnya sebagai guru ngaji anak-anak masjid dan ikatan remaja masjid. Ia merupakan lulusan pesantren sehingga mengantarkannya pada dunia kegamaan.

Isna Fitriani, wanita kelahiran Sukabumi, 14 April 2001. Merupakan mahasiswa semester enam yang sedang menempuh pendidikan formal jenjang S-1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ia adalah mahasiswa yang senang mencari dan mencoba hal-hal baru yang produktif sebagai wadah untuk pengembangan diri dengan mengikuti berbagai organisasi internal maupun eksternal. Tak hanya pendidikan formal, Isna juga sedang menjalani pendidikan nonformal di Pondok Pesantren Al-Ihsan yang berada di Cibiri Hilir, kota Bandung.

Kamil ihza. Lahir pada tanggal 17 maret 2000 di kota Bogor. Sebagai anak sulung, kamil memiliki adik bernama kahgi. Ayahnya seorang tukang becak sementara ibunya adalah penjual keripik di pasar.

Maulida Muthmainnah, tempat tanggal lahir Bandung 15 April 2001, ia adala anak ketiga dari empat bersaudara. Ia merupakan seorang mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Sunan GunungDjati Bandung. Selain seorang mahasiswa ia juga seorang pengajar di Taman Kanak-Kanak Masjid Al - Huda. Ini adalah karya pertamanya dalam membuat buku. Semoga bermanfaat.

Roby Zamzam Rafsanjani, lahir di Ciamis tanggal 01 September 2000. Merupakan mahasiswa semester delapan yang sedang menempuh pendidikan formal jenjang S-1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ia termasuk mahasiswa yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dalam mencari atau mencoba hal-hal baru, maka dari itu ia mengikuti berbagai organisasi internal maupun eksternal sebagai wadah untuk pengembangan diriyang produktif.

PANCASILA

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Efektifitas suatu sistem politik pada kenyataannya dapat diukur sejauh mana kemampuannya dalam menanggapi tuntutan-tuntutan maupun dukungan yang diterimanya serta merumuskannya dalam bentuk kebijakan ataupunoutputyang tepat.

Sistem Politik masalah aktual, karena setiap orang yang ingin berurusan dengan suatu negara lain, penting mengetahui tentang sistem politik negara yang dituju, misalnya negara-negara asean saja sudah terdapat bervariasi mengenai sitem politik negaranya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

KELOMPOK KEPENDIDIKAN

ISBN 978-623-88160-6-4 (PDF)
9 786238 816064